



LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang efisiensi penyederhanaan pelaporan, Laporan Kinerja disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD yang memuat Perencanaan Kinerja dan capaian Akuntabilitas Kinerja merupakan informasi akuntabilitas kinerja disusun pada Bab II LPPD dengan informasi data sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini juga dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan setiap tahunnya dan



sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Batam kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2021, sehingga dapat memberikan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dan dukungan instansi lainnya atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga upaya Mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Batam, 31 Maret 2022

Walikota Batam

MUHAMMAD RUDI



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Batam, 28 Maret 2022

Inspektur Daerah Kota Batam



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda
Nip. 19680824 199008 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KONDISI KOTA BATAM	1
C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ...	3
D. PERANGKAT DAERAH	5
E. SUMBER DAYA APARATUR	44
F. ISU STRATEGIS	46
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI KOTA BATAM TAHUN 2016 – 2021	53
B. MISI KOTA BATAM TAHUN 2016 – 2021	55
C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM	58
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	60
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	68
B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS	72



C. ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA	209
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	215
B. SARAN	216

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam	60
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021	64
Tabel 3 Nilai dan Predikat Kinerja	68
Tabel 4 Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam Tahun 2021	69
Tabel 5 Pencapaian Predikat Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 .	71
Tabel 6 Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021	72
Tabel 7 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 – 2021	76
Tabel 8 Realisasi Program Sasaran 1 Tahun 2021	76
Tabel 9 Realisasi Indikator Sasaran 2 tahun 2021	77
Tabel 10 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 tahun 2018 – 2021	80
Tabel 11 Realisasi Program Sasaran 2 Tahun 2021	80
Tabel 12 Realisasi Indikator Sasaran 3 tahun 2021	81
Tabel 13 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 tahun 2018 – 2021	84
Tabel 14 Realisasi Program Sasaran 3 Tahun 2021	85
Tabel 15 Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021	86
Tabel 16 Jumlah Kasus Pelanggaran Tahun 2018 – 2021	87
Tabel 17 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 tahun 2018 – 2021	87
Tabel 18 Realisasi Program Sasaran 4 Tahun 2021	89
Tabel 19 Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021	89
Tabel 20 Perbandingan realisasi indikator kinerja 5 Tahun 2018 – 2021	92
Tabel 21 Realisasi Program Sasaran 5 Tahun 2021	95
Tabel 22 Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021	95



Tabel 23 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 tahun 2018 – 2021	97
Tabel 24 Realisasi Program Sasaran 6 Tahun 2021	101
Tabel 25 Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021	102
Tabel 26 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 tahun 2018 – 2021	109
Tabel 27 Realisasi Program Sasaran 7 Tahun 2021	109
Tabel 28 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2021	111
Tabel 29 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam Tahun 2019 – 2021	112
Tabel 30 Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2018 – 2021	114
Tabel 31 Realisasi Program Sasaran 8 Tahun 2021	114
Tabel 32 Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2021	115
Tabel 33 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 tahun 2018 – 2021	117
Tabel 34 Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2021	120
Tabel 35 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 tahun 2018 – 2021	123
Tabel 36 Realisasi Program Sasaran 10 Tahun 2021	124
Tabel 37 Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2021	125
Tabel 38 Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang Tahun 2021	128
Tabel 39 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Tahun 2018 – 2021	129
Tabel 40 Realisasi Program Sasaran 11 Tahun 2021	129
Tabel 41 Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2021	130
Tabel 42 Nilai IKLH dan Kategori	131
Tabel 43 Nilai dan Predikat IKLH	131
Tabel 44 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 tahun 2018 – 2021	133
Tabel 45 Realisasi Program Sasaran 12 Tahun 2021	134
Tabel 46 Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2021	135



Tabel 47 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 tahun 2018 – 2021	138
Tabel 48 Realisasi Program Sasaran 13 Tahun 2021	138
Tabel 49 Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2021	139
Tabel 50 Jumlah Penumpang Yang Di Angkut Tahun 2018 - 2021	140
Tabel 51 Jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia Tahun 2021	141
Tabel 52 Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 tahun 2018 - 2021	145
Tabel 53 Realisasi Program Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 tahun 2021.....	145
Tabel 54 Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 14 tahun 2018 – 2021	147
Tabel 55 Realisasi Program Indikator Kinerja 2 Sasaran 14 tahun 2021.....	149
Tabel 56 Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 14 tahun 2018 – 2021	151
Tabel 57 Realisasi Program Indikator Kinerja 3 Sasaran 14 tahun 2021.....	152
Tabel 58 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 tahun 2019 – 2021	154
Tabel 59 Realisasi Program Sasaran 14 Tahun 2021	155
Tabel 60 Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2021	156
Tabel 61 Data capaian berdasarkan Basis Data Terpadu 2015	157
Tabel 62 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 tahun 2019 – 2021	159
Tabel 63 Realisasi Program Sasaran 15 Tahun 2021	161
Tabel 64 Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2021	162
Tabel 65 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 tahun 2018 – 2021	164
Tebel 66 Realisasi Program Sasaran 16 Tahun 2021	165
Tabel 67 Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2021	166
Tabel 68 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 tahun 2018 – 2021	169
Tebel 69 Realisasi Program Sasaran 17 Tahun 2021	169
Tabel 70 Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2021	170
Tabel 71 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 tahun 2018 – 2021	173



Tabel 72 Realisasi Program Sasaran 18 Tahun 2021	174
Tabel 73 Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2021	174
Tabel 74 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 tahun 2018 – 2021	181
Tabel 75 Realisasi Program Sasaran 19 Tahun 2021	182
Tabel 76 Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2021	183
Tabel 77 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Tahun 2018 – 2021	184
Tabel 78 Realisasi Program Sasaran 20 Tahun 2021	186
Tabel 79 Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2021	187
Tabel 80 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 Tahun 2018 – 2021	192
Tabel 81 Realisasi Program Sasaran 21 Tahun 2021	193
Tabel 82 Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2021	194
Tabel 83 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 Tahun 2018 – 2021	196
Tabel 84 Realisasi Program Sasaran 22 Tahun 2021	196
Tabel 85 Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2021	167
Tabel 86 Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d. akhir tahun 2021	198
Tabel 87 Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d. akhir tahun 2021	203
Tabel 88 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 Tahun 2018 – 2021	208
Tabel 89 Realisasi Program Sasaran 23 Tahun 2021	208
Tabel 90 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021	210



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2018-2021 ...	84
Grafik 2 Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2018 – 2021	97
Grafik 3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Batam Tahun 2019 – 2021	103
Grafik 4 Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2021 dengan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	113
Grafik 5 Pertumbuhan IPG – IDG Kota Batam Tahun 2018 – 2021	114
Grafik 6 Persentase penduduk miskin Kota Batam 2018 – 2021	117
Grafik 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2018 – 2021 ..	123
Grafik 8 Pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2018 – 2021	134
Grafik 9 Peningkatan Panjang Jalan yang berfungsi Baik Tahun 2016 – 2021	148
Grafik 10 Perkembangan penanganan titik banjir Kota Batam Tahun 2016 – 2021	151
Grafik 11 Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam Tahun 2017 – 2021	158
Grafik 12 Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam Tahun 2017 – 2021	158
Grafik 13 Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam Tahun 2018 – 2021	165



Grafik 14 Pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2018–2021 ...	173
Grafik 15 Nilai skor PPH Kota Batam tahun 2017 – 2021	181



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Akuntabilitas Kinerja ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja.

B. KONDISI KOTA BATAM

Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam karena Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara



tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan.

Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, dengan luas wilayah adalah 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.480 Ha (23%) dan luas wilayah perairan/laut 354.544 Ha (77%) (sumber: Bapelitbangda Kota Batam). Terdapat 370 buah pulau besar dan kecil (sumber: hasil verifikasi BIG tahun 2012). Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulang terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang. Kota Batam juga memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk



cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Karakteristik kepulauan di Kota Batam memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumber daya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah perairan laut.

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam. Penyediaan dan pemeliharaan RTH Privat menjadi tanggung jawab pihak swasta, perseorangan dan masyarakat. Keberadaan RTH Privat tentunya dapat membantu pemerintah kota untuk dapat memenuhi luasan RTH Publik. Besarnya keberadaan RTH Privat diharapkan dapat mewujudkan keberadaan RTH (Publik dan Privat) yang proporsional seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang yaitu proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat).

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintah konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kota dan penggunaan sumber daya yang



lebih efisien dilakukan oleh Kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olahraga;



- 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) perpustakaan; dan
 - 17) kearsipan.
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.

D. PERANGKAT DAERAH



Perangkat daerah dibentuk sebagai wadah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sesuai potensi daerah, beban kerja, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah. Perangkat Daerah di Kota Batam yang dibentuk berdasarkan



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Komposisi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 sebanyak 44 Perangkat Daerah termasuk kecamatan yang meliputi 64 kelurahan, yaitu:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 asisten dan 12 bagian yakni:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - 3) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 4) Bagian Kerja Sama
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
 - c) Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama



- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program
 - c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air
- c. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perlengkapan



- c) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 2) Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Pelaporan
- 2. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Bagian Legislasi dan Persidangan
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan Peraturan Daerah
 - b) Sub Bagian Persidangan
 - c) Sub Bagian Risalah
 - 3) Bagian Administrasi Keuangan
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan
 - c) Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban



- 4) Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Kearsipan
 - b) Sub Bagian Aset, Perlengkapan dan Rumah Tangga
 - c) Sub Bagian Pengamanan dan Lingkungan
 - 5) Bagian Humas dan Protokol
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Kehumasan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Informasi
3. Inspektorat, terdiri dari:
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Inspektur Pembantu I
 - 3) Inspektur Pembantu II
 - 4) Inspektur Pembantu III
 - 5) Inspektur Pembantu IV
 - 6) Inspektur Pembantu V
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian



- b) Seksi Fasilitasi Koordinasi ketertiban Umum
 - c) Seksi Pendataan Dan Penataan
 - 3) Bidang Penegakan Perundangan undangan Daerah
 - a) Seksi Penyuluhan
 - b) Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
 - c) Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
 - 4) Bidang Sumber Daya Aparatur
 - a) Seksi Pelatihan Dasar
 - b) Seksi Teknis Fungsional
 - c) Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS
 - 5) Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a) Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b) Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas
5. Dinas Pendidikan;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b) Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
 - 3) Bidang Pembinaan Sekolah menengah Pertama
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian;



- b) Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
- c) Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum Dan Penilaian;
 - b) Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana; dan
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 5) Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6. Dinas Kesehatan;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a) Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
 - 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; dan



- c) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Mutu
 - 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a) Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - b) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Bina Marga
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan/Pelantar
 - b) Seksi Jalan
 - c) Seksi Jembatan Dan Pelantar
 - 3) Bidang Sumber Daya Air
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
 - b) Seksi Drainase Dan Sungai
 - c) Seksi Pantai Dan Waduk
 - 4) Bidang Peralatan dan Pengujian



- a) Seksi Operasional Peralatan
 - b) Seksi Pemeliharaan Peralatan
 - c) Seksi Pengujian
- 5) Bidang Penerangan Jalan Umum
- a) Seksi Perencanaan Teknis Penerangan Jalan Umum
 - b) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum
 - c) Seksi Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Prasarana Bangunan Gedung
 - a) Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;
 - b) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Gedung.
 - 3) Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah
 - a) Seksi Bina Teknik Air Bersih Dan Air Limbah;
 - b) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - c) Seksi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah.
 - 4) Bidang Tata Ruang
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Tata Ruang



- 5) Bidang Bina Konstruksi
 - a) Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b) Seksi Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
 - c) Seksi Bina Kompetensi Dan Produktifitas Jasa Konstruksi
9. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Perumahan Rakyat
 - a) Seksi Rumah Susun;
 - b) Seksi Rumah Umum dan Komersial; dan
 - c) Seksi Rumah Khusus dan Swadaya
 - 3) Bidang Permukiman
 - a) Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - b) Seksi Peningkatan Infrastruktur Permukiman; dan
 - c) Seksi Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 4) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 - b) Seksi Pemeliharaan Taman; dan
 - c) Seksi pemakaman
10. Dinas Pertanahan;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 2) Bidang Penatagunaan Dan Pendayagunaan Tanah
 - a) Seksi Penatagunaan Tanah;
 - b) Seksi Pendayagunaan Tanah; dan
 - c) Seksi Penataan Kawasan Tertentu
 - 3) Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah
 - a) Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - b) Seksi Pengadaan Tanah; dan
 - c) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
 - 4) Bidang Pengawasan Pertanahan Dan Penanganan Masalah Pertanahan
 - a) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 - b) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan
 - c) Seksi Data dan Informasi Pertanahan
11. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 - b) Seksi Penanganan Fakir Miskin wilayah pesisir dan perbatasan; dan
 - c) Seksi Swadaya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 3) Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;



- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
- 4) Bidang Perlindungan, Jaminan Dan Pemberdayaan Sosial
- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b) Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Dan Bantuan Sosial
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a) Seksi Pemberdayaan Kelurahan Dan ketahanan masyarakat;
 - b) Seksi Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
12. Dinas Tenaga Kerja;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - b) Seksi Penempatan Lembaga Penempatan Pembantu Rumah Tangga (LPPRT) dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - c) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Dalam Negeri
 - 3) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas



- a) Seksi Pelatihan Kerja;
 - b) Seksi Instruktur dan Kelembagaan; dan
 - c) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
- 4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial
- a) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - b) Seksi Pembinaan Norma Hubungan Kerja; dan
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 5) Bidang Pembinaan Jaminan Sosial
- a) Seksi Persyaratan Kerja;
 - b) Seksi Pengupahan; dan
 - c) Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja
13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pemuda
 - a) Seksi Bina Kewirausahaan;
 - b) Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan; dan
 - c) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan
 - 3) Bidang Olah Raga
 - a) Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c) Seksi Pembinaan dan Pelatihan
 - 4) Bidang Sarana dan Prasarana



- a) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- b) Seksi Sarana dan prasarana Olah Raga;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Pramuka

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a) Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b) Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik Dan Hukum; dan
 - c) Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- 3) Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - a) Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan Dan Budaya;
 - b) Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi
 - c) Seksi Pemenuhan Hak Anak Dibidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- 4) Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan
 - a) Seksi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;



- b) Seksi Perlindungan Anak; dan
- c) Seksi Data Informasi Perempuan Dan Anak
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Dan Pengendalian Penduduk;
 - b) Seksi Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - c) Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi
- 6) Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga
 - a) Seksi Bina Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Seksi Pendayagunaan Dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - c) Seksi Data Dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
- 15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Ketahanan Pangan
 - a) Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan;
 - b) Seksi Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
 - c) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan.
 - 3) Bidang Kelembagaan Dan Penyuluh
 - a) Seksi Pengembangan Dan Kelembagaan Penyuluh;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan



- Peternak; dan
- c) Seksi Programa Penyuluhan
- 4) Bidang Pertanian
 - a) Seksi Sarana Dan Prasarana Pertanian;
 - b) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Dan Pengawasan Pupuk dan Pesticida
- 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a) Seksi Perbibitan Dan Produksi Ternak;
 - b) Seksi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c) Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 16. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Tata Lingkungan
 - a) Seksi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b) Seksi Kajian Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat; dan
 - c) Seksi Informasi Lingkungan Hidup
 - 3) Bidang Pengelolaan Persampahan
 - a) Seksi Pengurangan Sampah;



- b) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c) Seksi Retribusi
 - 4) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup
 - a) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam
 - 5) Bidang Pengawasan dan Penindakan
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c) Seksi Penindakan dan Unit Reaksi Cepat
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c) Seksi Pendataan Penduduk
 - 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a) Seksi Kelahiran;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan



- a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- 5) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- a) Seksi Kerjasama;
 - b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - c) Seksi Inovasi Pelayanan
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pencegahan
 - a) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 3) Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana
 - a) Seksi Operasi;
 - b) Seksi Penanggulangan Bencana dan Investigasi; dan
 - c) Seksi Data dan Informasi
 - 4) Bidang Sarana Prasarana dan Logistik
 - a) Seksi Prasana;
 - b) Seksi Sarana dan Logistik; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarpras
19. Dinas Perhubungan;



- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Lalu Lintas
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi keselamatan lalu lintas; dan
 - c) Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas.
 - 3) Bidang Angkutan Jalan
 - a) Seksi Angkutan Orang;
 - b) Seksi Angkutan Barang; dan
 - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 4) Bidang Prasarana Perhubungan
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - c) Seksi Prasarana Angkutan Laut
 - 5) Bidang Laut
 - a) Seksi Kepelabuhanan;
 - b) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - c) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 2) Bidang Komunikasi dan Kehumasan
 - a) Seksi Pemberitaan;
 - b) Seksi Publikasi; dan
 - c) Seksi Dokumentasi
 - 3) Bidang Penyelenggaran E-Government
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b) Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c) Seksi Tata Kelola E-Government
 - 4) Bidang Statistik
 - a) Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b) Seksi Analisis Dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
 - c) Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral
 - 5) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian
 - a) Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
 - b) Seksi Layanan Informasi Publik;
 - c) Seksi Persandian
21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/Koperasi Simpan Pinjam(KSP), Pengawasan, dan Pemeriksaan
 - a) Seksi Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);



- b) Seksi Izin Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
 - 3) Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi SimpanPinjam
 - a) Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - b) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - c) Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam.
 - 4) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - a) Seksi Kelembagaan;
 - b) Seksi Usaha Koperasi; dan
 - c) Seksi Perlindungan Koperasi
 - 5) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
 - a) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - c) Seksi Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Data Usaha Mikro
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Promosi, Data dan Informasi
 - a) Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - b) Seksi Data Penanaman Modal; dan
 - c) Seksi Informasi Penanaman Modal



- 3) Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
 - c) Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi Serta Mediasi
 - 4) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial
 - a) Seksi Perizinan Ekonomi;
 - b) Seksi Perizinan Sosial; dan
 - c) Seksi Perizinan Penanaman Modal
 - 5) Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - a) Seksi Perizinan Pembangunan;
 - b) Seksi Perizinan Utilitas; dan
 - c) Seksi Perizinan Lingkungan Hidup
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Kebudayaan
 - a) Seksi Adat dan Tradisi;
 - b) Seksi Kesenian; dan
 - c) Seksi Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 3) Bidang Sarana dan Obyek Wisata
 - a) Seksi Sarana Wisata;
 - b) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan



- c) Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi
 - 4) Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata
 - a) Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataaan;
 - b) Seksi Promosi Wisata; dan
 - c) Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan
 - 5) Bidang Ekonomi Kreatif
 - a) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
 - b) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan
 - c) Seksi Fasilitasi Ekonomi Kreatif
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Layanan, Otomasi dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
 - a) Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - b) Seksi Otomasi dan Alih Media; dan
 - c) Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca
 - 3) Bidang Pengembangan, Pengolahan, Konservasi dan Pembinaan Perpustakaan
 - a) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b) Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan; dan
 - c) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Tenaga Kepustakaan.
 - 4) Bidang Kearsipan



- a) Seksi Pengelolaan Kearsipan;
- b) Seksi Pembinaan Kearsipan; dan
- c) Seksi Pengawasan Kearsipan.

25. Dinas Perikanan;

- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Perikanan Tangkap
 - a) Seksi Sarana, Prasarana Dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b) Seksi Kenelayanan Dan Diversifikasi Usaha Penangkapan; dan
 - c) Seksi Data, informasi Dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
- 3) Bidang Perikanan Budidaya
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - b) Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Usaha Budidaya
- 4) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Produk Perikanan;
 - b) Seksi Bina Mutu Diversifikasi Produk Perikanan; dan
 - c) Seksi Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
 - d) Seksi Penguatan sumber Daya Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan pengolahan Hasil Perikanan;
 - e) Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh; dan



f) Seksi Data, Informasi dan Programa Penyuluh

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

1) Sekretariat

a) Sub Bagian Perencanaan Program

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Bidang Perdagangan

a) Seksi Ekspor dan Impor;

b) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan; dan

c) Seksi Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan

3) Bidang Pasar

a) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat dan Tradisional;

b) Seksi Bina Pasar dan Sektor Informal; dan

c) Seksi Pengawasan Pasar

4) Bidang Tertib Niaga

a) Seksi Pengawasan Kemetrollogian dan Perlindungan Konsumen;

b) Seksi Informasi dan Penyuluhan Perdagangan; dan

c) Seksi Penegakan Hukum

5) Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Seksi Sarana Industri;

b) Seksi Energi Dan Sumber Daya Mineral; dan

c) Seksi Kerajinan Industri

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



- 1) Sekretariat
 - d) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - e) Sub Bagian Keuangan; dan
 - f) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas
 - a) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - b) Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c) Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN
 - 3) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi
 - a) Sub Bidang Mutasi;
 - b) Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
 - 4) Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
 - a) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - b) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - c) Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
 - 5) Bidang Pengembangan Aparatur
 - a) Sub Bidang Diklat Struktural dan Sertifikasi;
 - b) Sub Bidang Diklat Teknis, Fungsional dan Pendidikan Formal;
dan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
28. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;



- b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - a) Sub Analisis Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - c) Sub Bidang Data, Perencanaan Program, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - a) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM; dan
 - c) Sub Bidang Pemerintahan
 - 4) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b) Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Pariwisata; dan
 - c) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 5) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a) Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengembangan Wilayah;
 - b) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman; dan
 - c) Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Perhubungan Statistik dan Persandian
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Anggaran
 - a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan Daerah;
 - b) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian dan Penyediaan Anggaran Belanja Daerah
 - 3) Bidang Perbendaharaan
 - a) Sub Bidang Pengeluaran Belanja Daerah;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Belanja Pegawai
 - 4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - b) Sub Bidang Akuntansi Belanja; dan
 - c) Sub Bidang Pelaporan
 - 5) Bidang Aset
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
 - b) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah; dan
 - c) Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah.
30. Badan Pendapatan Daerah;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;



- b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Pendataan Penetapan dan Pelaporan
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - c) Sub Bidang Validasi dan Pelaporan
 - 3) Bidang Pembukuan
 - a) Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi;
 - b) Sub Bidang Pembukuan PBB P2 dan BPHTB; dan
 - c) Sub Bidang Penyelesaian Piutang
 - 4) Bidang Pengawasan, Penagihan dan Keberatan
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - c) Sub Bidang Pertimbangan dan Keberatan
 - 5) Bidang Pengembangan Evaluasi dan Sistem Informasi
 - a) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - b) Sub Bidang Evaluasi Pajak dan Retribusi; dan
 - c) Sub Bidang Sistem Informasi Pajak dan Retribusi
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi;



- b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - 3) Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini & Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik
 - 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - a) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
 - 5) Bidang Politik
 - a) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
32. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Pada Dinas Kesehatan Kota Batam, terdiri dari;
- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - 1) Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
 - 2) Bagian Program dan Kerjasama; dan
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama
 - b) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - 3) Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi



- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan
 - 1) Bidang Pelayanan Medik;
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - 2) Bidang Keperawatan;
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan
 - b) Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan
 - 3) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
 - a) Seksi Penunjang Medik
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.

33. Kecamatan Batam Kota terdiri dari:

- 1) Kelurahan Teluk Tering;
- 2) Kelurahan Taman Baloi;
- 3) Kelurahan Sukajadi;
- 4) Kelurahan Belian;
- 5) Kelurahan Sungai Panas;
- 6) Kelurahan Baloi Permai.

34. Kecamatan Nongsa terdiri dari:

- 1) Kelurahan Kabil;
- 2) Kelurahan Sambau;
- 3) Kelurahan Batu Besar;
- 4) Kelurahan Ngenang.

35. Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari;

- 1) Kelurahan Tanjung Piayu;
- 2) Kelurahan Duriangkang;



- 3) Kelurahan Mangsang;
- 4) Kelurahan Muka Kuning.

36. Kecamatan Sagulung terdiri dari:

- 1) Kelurahan Tembesi;
- 2) Kelurahan Sungai Binti;
- 3) Kelurahan Sungai Lekop;
- 4) Kelurahan Sagulung Kota;
- 5) Kelurahan Sungai Langkai;
- 6) Kelurahan Sungai Pelunggut.

37. Kecamatan Batu Aji terdiri dari:

- 1) Kelurahan Bukit Tempayan;
- 2) Kelurahan Buliang;
- 3) Kelurahan Kibing;
- 4) Kelurahan Tanjung Uncang

38. Kecamatan Sekupang terdiri dari:

- 1) Kelurahan Tanjung Riau;
- 2) Kelurahan Tiban Indah;
- 3) Kelurahan Patam Lestari;
- 4) Kelurahan Tiban Baru;
- 5) Kelurahan Tiban Lama;
- 6) Kelurahan Sungai Harapan;
- 7) Kelurahan Tanjung Pinggir.

39. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari:

- 1) Kelurahan Tanjung Sengkuang;
- 2) Kelurahan Sungai Jodoh;



- 3) Kelurahan Batu Merah;
- 4) Kelurahan Kampung Seraya

40. Kecamatan Bengkong terdiri dari:

- 1) Kelurahan Bengkong Laut;
- 2) Kelurahan Bengkong Indah;
- 3) Kelurahan Sadai;
- 4) Kelurahan Tanjung Buntung

41. Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari:

- 1) Kelurahan Kampung Pelita;
- 2) Kelurahan Batu Selicin;
- 3) Kelurahan Lubuk Baja Kota;
- 4) Kelurahan Tanjung Uma;
- 5) Kelurahan Baloi Indah

42. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari:

- 1) Kelurahan Tanjung Sari;
- 2) Kelurahan Sekanak Raya;
- 3) Kelurahan Pemping;
- 4) Kelurahan Pulau Terong;
- 5) Kelurahan Pecong;
- 6) Kelurahan Kasu.

43. Kecamatan Galang terdiri dari:

- 1) Kelurahan Sijantung;
- 2) Kelurahan Karas;
- 3) Kelurahan Sembulang;
- 4) Kelurahan Subang Mas;



- 5) Kelurahan Rempang Cate;
- 6) Kelurahan Air Raja;
- 7) Kelurahan Pulau Abang;
- 8) Kelurahan Galang Baru;

44. Kecamatan Bulang terdiri dari :

- 1) Kelurahan Pulau Buluh;
- 2) Kelurahan Temoyong;
- 3) Kelurahan Batu Legong;
- 4) Kelurahan Pantai Gelam;
- 5) Kelurahan Setokok;
- 6) Kelurahan Bulang Lintang;

Adapun Luas Daratan menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (km²/sq.km), 2020 dapat dilihat berikut ini:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
I. Belakang Padang		69.120
	1. Pulau Terong	5.791
	2. Pecong	1.382
	3. Kasu	50.637
	4. Pemping	4.249
	5. Tanjung Sari	2.041
	6. Sekanak Raya	5.020



Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
II. Bulang		158.753
	1. Pantai Gelam	25.853
	2. Temoyong	5.351
	3. Pulau Setokok	24.886
	4. Batu Legong	49.775
	5. Bulang Lintang	50.697
	6. Pulau Buluh	2.187
III. Galang		350.764
	1. Pulau Abang	28.612
	2. Karas	50.449
	3. Sijantung	39.610
	4. Sembulang	65.834
	5. Rempang Cate	91.523
	6. Subang Mas	20.254
	7. Galang Baru	50.287
	8. Air Raja	4.191
IV. Sei Beduk		106.447
	1. Tanjung Piayu	28.595
	2. Duriangkang	11.273
	3. Mangsang	9.999
	4. Mukakuning	56.581



Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
V. Nongsa		114.546
	1. Ngenang	19.546
	2. Kabil	25.915
	3. Batu Besar	41.009
	4. Sambau	28.074
VI. Sekupang		68.302
	1. Tanjung Riau	23.902
	2. Tiban Baru	3.886
	3. Tiban Lama	14.094
	4. Tiban Indah	5.936
	5. Patam Lestari	6159
	6. Sungai Harapan	3.325
	7. Tanjung Pinggir	10.999
VII. Lubuk Baja		11.426
	1. Batu Selicin	1.331
	2. Lubuk Baja Kota	1.459
	3. Kampung Pelita	1.393
	4. Baloi Indah	3.519
	5. Tanjung Uma	3.724



Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
VIII. Batu Ampar		11.187
	1. Tanjung Sengkuang	3.787
	2. Sungai Jodoh	2.161
	3. Batu Merah	3.792
	4. Kampung Seraya	1.447
IX. Batam Kota		38.964
	1. Teluk Tering	5.890
	2. Taman Baloi	4.065
	3. Sukajadi	3.374
	4. Belian	17.683
	5. Sungai Panas	2.991
	6. Baloi Permai	4.960
X. Sagulung		54.780
	1. Tembesi	30.512
	2. Sungai Binti	5.356
	3. Sungai Lekop	3.723
	4. Sagulung Kota	1.933
	5. Sungai Langkai	3.983
	6. Sungai Pelunggut	9.271



Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
XI. Batu Aji		41.337
	1. Bukit Tempayan	1.738
	2. Buliang	2.789
	3. Kibing	14.535
	4. Tanjung Uncang	22.274
XII. Bengkong		13.214
	1. Bengkong Laut	1.829
	2. Bengkong Indah	0,999
	3. Sadai	6.326
	4. Tanjung Buntung	4.060

Sumber : BPS Kota Batam

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebanyak 40 UPT, yaitu:

1. Cabang Dinas Pendidikan Belakang Padang
2. Cabang Dinas Pendidikan Bulang
3. Cabang Dinas Pendidikan Galang
4. UPTD Puskesmas Belakang Padang
5. UPTD Puskesmas Sungai Panas
6. UPTD Puskesmas Batu Aji
7. UPTD Puskesmas Kabil



8. UPTD Puskesmas Galang
9. UPTD Puskesmas Sekupang
10. UPTD Puskesmas Baloi Permai
11. UPTD Puskesmas Sungai Pancur
12. UPTD Puskesmas Tanjung Sengkuang
13. UPTD Puskesmas Sambau
14. UPTD Puskesmas Lubuk Baja
15. UPTD Puskesmas Sei Lekop
16. UPTD Puskesmas Bulang
17. UPTD Puskesmas Botania
18. UPTD Puskesmas Sei Langkai
19. UPTD Puskesmas Tiban Baru
20. UPTD Puskesmas Tanjung Buntung - Bengkong
21. UPTD Puskesmas Kampung Jabi
22. UPTD Puskesmas Rempang Cate
23. UPTD Puskesmas Tanjung Uncang
24. UPTD Puskesmas Instalasi Farmasi
25. UPTD Pengelola Air Bersih
26. UPTD Pengawasan Pengendalian Bangunan gedung dan menara
27. UPTD Pengelolaan Rumah Susun Sewa
28. UPTD Kebun Raya Batam
29. UPTD Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
NilamSuri
30. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas
31. UPTD Pusat Kesehatan Hewan



32. UPTD Pelayanan Bidang Perikanan
33. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
34. UPTD Tempat Pembuangan Akhir Telaga Punggur
35. UPTD Pelayanan Parkir
36. UPTD Pelayanan Jasa Transportasi
37. UPTD LPSE
38. UPTD Metrologi
39. UPTD Dana Bergulir
40. Kegiatan Sanggar Belajar

E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 5.662 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	18	0	18	0,32
SLTP	21	3	24	0,42
SLTA	495	210	705	12,45
D.I	1	6	7	0,12
D.II	36	93	129	2,28
D.III	111	527	638	11,27
D.IV	66	76	142	2,51
S-1	1379	2219	3598	63,55



S-2	213	179	392	6,92
S-3	5	0	5	0,09
Jumlah	2.347	3.315	5.662	100

2. Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
I	28	0	28	0,49
II	482	268	750	13,25
III	1540	2514	4054	71,60
IV	297	533	830	14,66
Jumlah	2.347	3.315	5.662	100

3. Berdasarkan Eselon

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
II.a	1	0	1	0,10
II.b	30	7	37	3,56
III.a	39	11	50	4,81
III.b	80	28	108	10,38
IV.a	345	229	574	55,19
IV.b	150	120	270	25,96
Jumlah	645	395	1.040	100



4. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Struktural	645	395	1040	18,37
Fungsional	824	2292	3116	55,03
Staf	878	628	1506	26,60
Jumlah	2.347	3.315	5.662	100

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal.

Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kota Batam di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kota Batam. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi.



Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Pembangunan Kota Batam tahun mendatang. Begitu juga telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menghasilkan isu-isu tingkat nasional dan telaah terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan isu-isu regional (provinsi) yang harus dipertimbangkan dan selaras dengan kebijakan Pembangunan Kota Batam pada tahun selanjutnya. Semua hal-hal tersebut mempengaruhi Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kepulauan Riau yang menjadikan Kota Batam sebagai pusat hubungan logistik internasional dan Industri kedirgantaraan, pariwisata, industri digital dan kreatif, serta *international trade and finance center*. Dari hasil identifikasi, maka ditetapkan isu-isu strategis Kota Batam antara lain:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi. Untuk merealisasikan hal ini, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kota Batam, maupun komponen eksternal, yakni BP Batam. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kota Batam dapat diwujudkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan. Adapun fokus isu



dalam penerapan “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” adalah:

- a. Menghadirkan Clean Government,
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan,
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

2. Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah;

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Adapun fokus isu dalam penerapan “Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah” adalah:

- a. Penanganan ruas jalan strategis nasional dan provinsi, jalan-jalan di kawasan pemukiman maupun ruas jalan non status yang mempunyai nilai strategis dan ekonomi,
- b. Penanganan perumahan kumuh, penyediaan rumah murah dan Rusun, serta Peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan pemukiman,
- c. Penyediaan transportasi massal darat dan laut yang murah dan representatif guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah perkotaan dan hinterland,
- d. Penanggulangan banjir,
- e. Pembangunan dan jembatan dan pelantar beton di wilayah hinterland.



3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing;

Sedikitnya terdapat dua paradigma pembangunan yang harus digunakan sebagai pijakan dalam pembangunan pelayanan dasar masyarakat perkotaan. Paradigma pertama adalah paradigma pembangunan yang berfokus pada sumber daya manusia (*people centered paradigm*), dimana dalam konteks ini manusia ditempatkan sebagai fokus utama dalam pembangunan. Paradigma kedua adalah paradigma pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan (*welfare paradigm*), dimana paradigma ini berfokus pada upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masih miskin/memiliki kekurangan dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan. Adapun fokus isu dalam “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan,
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan kesehatan masyarakat,
- c. Pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin,
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat dunia dalam *Sustainable Development Goals* antara lain pembangunan harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran



lingkungan (persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Untuk penyediaan air bersih, Kota Batam melalui Badan Pengusahaan Kawasan Batam bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dimana air bersih di Kota Batam hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air baku yang ditampung.

5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Kota Batam, diperlukan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah termasuk pekerja/pedagang informal, hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan standar kualitas produk UMKM dan bertujuan untuk menciptakan sinergitas UMKM dengan industri strategis di Kota Batam, atau dengan menyediakan fasilitas dan modal kerja bagi UMKM dan enterpreneur muda. Adapun fokus pada isu ini adalah:

- a. Kualitas dan daya saing tenaga kerja,
- b. Kualitas transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi,
- c. Akses permodalan, kualitas dan akses pemasaran produk UMKM.



6. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Teknologi informasi diartikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. *Electronic Government (E-Government)*, menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e- Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Batam perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima. Adapun fokus dalam isu “Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi” adalah:

- a. Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart City*),
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.



7. Peningkatan Kualitas Produk Kepariwisata (Jasa dan Perdagangan sebagai Unggulan Kota Batam);

Selain terkenal dengan industrinya, Kota Batam juga terkenal dengan potensi wisatanya. Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Batam sangat tinggi sehingga sangat berpengaruh besar terhadap sektor penerimaan (PAD) Kota Batam yakni dari segi hotel, restoran dan hiburan. Namun, umumnya wisatawan yang datang masih menjadikan Kota Batam sebagai daerah transit menuju daerah wisatawan lainnya. Kondisi demikian menuntut Pemerintah melakukan upaya-upaya agar para wisatawan tertarik lebih lama menikmati Kota Batam. Terdapat 4 (empat) fokus isu dalam “Peningkatan Kualitas Produk Kepariwisata (Jasa dan Perdagangan sebagai Unggulan Kota Batam)”, fokus isu tersebut adalah:

- a. Ekowisata bahari,
- b. Pusat wisata kuliner,
- c. Wisata historis dan budaya,
- d. Investasi pariwisata,
- e. Promosi pariwisata.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arah dan kebijakan bagi penyusunan program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. VISI KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

Visi Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah

**“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya
Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”**

Visi tersebut di atas memberikan pemahaman dan makna sebagai berikut :

- Batam meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.
- Bandar dunia dalam makna mengarahkan pengembangan dan pembanguana Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam



jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

- Madani mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- Berdaya Saing dalam makna mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
- Maju adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sejahtera bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan



memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

- Bermartabat mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

B. MISI KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Kota Batam, yaitu:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warganya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



2. Mewujudkan SDM Daerah yang Bertaqwa, Berdaya saing dan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan Infrastruktur Perkotaan yang Modern serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

4. Mewujudkan penguatan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas



infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi



terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM

Dalam penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan;

Sasaran:

- a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
- b. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

2. Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat;

Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- c. Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan

3. Mewujudkan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, olahraga dan ketenagakerjaan yang unggul, merata, terjangkau, berdaya saing dan bertaqwa menuju masyarakat sejahtera.

Sasaran:



- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik
 - b. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
 - c. Meningkatkan kualitas peran gender
 - d. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
 - e. Mengurangi angka pengangguran
4. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;

Sasaran:

- a. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - c. Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan
5. Menyediakan Infrastruktur kota yang berkualitas, serta permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan;

Sasaran:

- a. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman
 - b. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak
6. Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, investasi, dan perikanan dan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan perdagangan
- b. Meningkatkan Pengembangan Pariwisata
- c. Peningkatan Investasi Kota Batam
- d. Meningkatkan sektor pertanian/perikanan



7. Terwujudnya Ekonomi Masyarakat yang Tangguh dan Mandiri.

Sasaran:

Meningkatnya peran industri kecil menengah, koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah

8. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan memperluas akses hinterland.

Sasaran:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland
- b. Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland
- c. Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sesuai lampiran surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor: 312/Bapelitbangda/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sesuai dengan Ranperda Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	Opini BPK
		Evaluasi SAKIP



2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran K3
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda
5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	Persentase kelengkapan administrasi kependudukan
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Angka Harapan Lama Sekolah
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Angka Usia Harapan Hidup
8	Meningkatkan kualitas peran gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan



10	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum
		Persentase jalan dalam kondisi baik
		Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Rumah Layak Huni
16	Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	Length of Stay (Lama Kunjungan)



18	Peningkatan Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Investasi
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
20	Meningkatnya peran industri kecil menengah, koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro
21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland
		Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland
		Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland
22	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta
		Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland



E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada dokumen IKU Kota Batam Tahun 2016-2021, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Opini BPK	WTP
		Evaluasi SAKIP	70,5
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	3,5 - < 4,2
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	90%
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	70%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	70%



5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	Persentase kelengkapan administrasi kependudukan	97,5%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Angka Harapan Lama Sekolah	13,50
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12 Tahun
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Angka Usia Harapan Hidup	72,90 Tahun
8	Meningkatkan kualitas peran gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,54
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,05
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	4,6%
10	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	6%
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	95%
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	67%



13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	100%
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	14,55%
		Persentase jalan dalam kondisi baik	81%
		Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	15 titik
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	85,77
16	Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan	Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	42,94%
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	Length of Stay (Lama Kunjungan)	2,09
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Investasi	18,73%
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	94,1%
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	15



21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	100%
		Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland	100%
		Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	6,76
22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	100
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	39,55
		Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	13,24



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun yang disusun melalui media pelaporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi setiap indikator kinerja sasaran dengan targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Bab ini juga akan menjabarkan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Kemudian dijelaskan program yang mendukung setiap sasaran, realisasi anggaran program, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidaktercapaian pencapaian sasaran kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3
Nilai dan Predikat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah



Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Batam
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	Predikat Capaian Kinerja
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	2	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	1	75,43	Sedang
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	2	33,80	Sangat Rendah
5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	1	96,86	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	2	95,24	Sangat Tinggi



7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1	100,63	Sangat Tinggi
8	Meningkatkan kualitas peran gender	2	97,99	Sangat Tinggi
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	1	89,11	Tinggi
10	Mengurangi angka pengangguran	1	51,55	Rendah
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	82,36	Tinggi
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	1	108,21	Sangat Tinggi
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	1	100	Sangat Tinggi
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	3	168,52	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	1	102,72	Sangat Tinggi
16	Meningkatkan kinerja sektor perindustrian dan perdagangan	1	138,82	Sangat Tinggi
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	1	n.a	-



18	Peningkatan Investasi Kota Batam	1	169,94	Sangat Tinggi
19	Meningkatkan sektor pertanian/ perikanan	1	92,35	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	1	35,13	Sangat Rendah
21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	3	75,01	Tinggi
22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	1	100	Sangat Tinggi
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	2	101,36	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja 23 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 5

Pencapaian Predikat Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2021

No.	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Tinggi	14	60,87
2.	Tinggi	3	13,04
3.	Sedang	1	4,35
4.	Rendah	2	8,70
5.	Sangat Rendah	2	8,70
6.	Data Tidak Tersedia	1	4,35
Jumlah		23	100



Terhadap pencapaian kinerja diatas dibandingkan dengan penggunaan efisiensi anggaran dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{(\text{Realisasi Biaya} \times 100\%)}{\text{Pagu Biaya}}$$

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran “TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF DAN BERKUALITAS”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini direalisasikan dengan 2 (dua) indikator kinerja, telah diukur dengan predikat “Sangat Tinggi” dan hasil diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 6

Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2.	Evaluasi SAKIP	Nilai	70,5	n/a	n/a
Rata-rata capaian					100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam pada tahun 2021 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, sesuai surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 80.A/LHP/XVIII.TJP/05/2021 dan Nomor: 80.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2020 tanggal 03 Mei 2021. Dengan demikian capaian indikator kinerja “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tercapai 100%.



Capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” Pemerintah Kota Batam telah diraih sejak tahun 2011 secara berturut-turut hingga tahun ini. Adapun strategi yang diterapkan antara lain:

1. Menerapkan sistem penyusunan, pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu, tepat sasaran, dengan meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.



2. Menerapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menerapkan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah serta integrasi sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batam.

b. Predikat SAKIP Kota Batam

Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2021 belum dapat disampaikan, hal ini dikarenakan hasil penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia belum dirilis.

Dalam mencapai target pada indikator ini masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum maksimalnya penyajian dokumen pelaporan dikarenakan komponen perencanaan yang belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
2. Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
3. Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
4. Hampir seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam belum memiliki orientasi terhadap pencapaian kinerja dibanding dengan pelaksanaan kegiatan.



Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut, yakni:

1. Melakukan reviu/perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan indikator dalam dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan kinerja turunannya (Renstra; Rencana Kinerja Tahunan; Indikator Kinerja Utama; dan Perjanjian Kinerja).
2. Mengembangkan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai kepada pimpinan tertinggi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
3. Mengintegrasikan aplikasi yang telah ada mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaporan baik pelaporan kinerja maupun keuangannya.
4. Melakukan evaluasi program dan monitoring rencana aksi secara berkala terhadap capaian kinerja.
5. Memanfaatkan hasil evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan program sebagai rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 7

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 tahun 2018 – 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Evaluasi SAKIP	Nilai	64,74	64,83	65,21	n/a (Target : 70,50)

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 8

Realisasi Program Sasaran 1 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.012.913.593	11.641.115.945
2.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	678.623.000	550.661.000
3.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.847.513.800	5.950.974.600
Total		23.539.050.393	18.142.751.545
Persentase			77,08

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Realisasi dana program yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah 77,08%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 22,92%.

2. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi” mencapai predikat “**Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks SPBE	3,5 - < 4,2	2,64	75,43

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kota Batam yang telah dilakukan mulai tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam usaha pelaksanaan SPBE tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Kota Batam menerapkan kewenangan SPBE ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.



Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada indeks 3,11, pencapaian pada tahun 2021 dengan indeks 2,64 atau 75,43% mengalami penurunan sebesar 15,11%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dengan minimal pencapaian pada indeks 3,5 maka perlu kerja keras bagi Pemerintah Kota Batam untuk mengejar ketertinggalan dikarenakan pencapaian tidak mencapai rentang penilaian. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Kompetensi SDM TIK masih terbatas. Jumlah SDM yang memiliki kompetensi masih sangat kurang. Kesiapan SDM dengan kompetensi kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni masih menjadi kendala yang besar



2. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga membuat rendahnya sinergisitas untuk wujudkan digitalisasi pemerintahan.
3. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal

Dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha untuk berpartisipasi dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2018 - 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 10
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Indeks SPBE	Nilai	1,8-< 2,6	2,6 - < 3,5	3,11	2,64

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Program Sasaran 2 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa	6.722.335.840	6.593.786.532
2.	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	4.361.049.000	3.926.216.572
3.	Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah	11.005.000	11.005.000
4.	Program Keamanan Data dan Informasi	59.854.535	59.854.535
Total		11.154.244.375	10.590.862.639
Persentase			94,95%

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 94,95%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 5,05%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 75,43%, maka efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran tersebut belum berhasil secara maksimal.

3. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12
Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Perencanaan	90	90	100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat)

tahapan, yakni:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.



Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk menciptakan perencanaan yang berkualitas. Salah satu upaya yakni dengan meningkatkan indeks kualitas perencanaan yang didapat dari perhitungan 60% capaian sasaran pemerintah kota + 20% capaian sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah. Pada tahun 2021 indeks kualitas perencanaan Pemerintah Kota Batam tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai target yang ditetapkan yakni 90%. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Baiknya kualitas pelaksanaan rencana tidak terlepas dari baiknya penyusunan dan



penetapan rencana. Namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharuskan Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi.
3. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.
4. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Perkembangan realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan capaian 100% dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

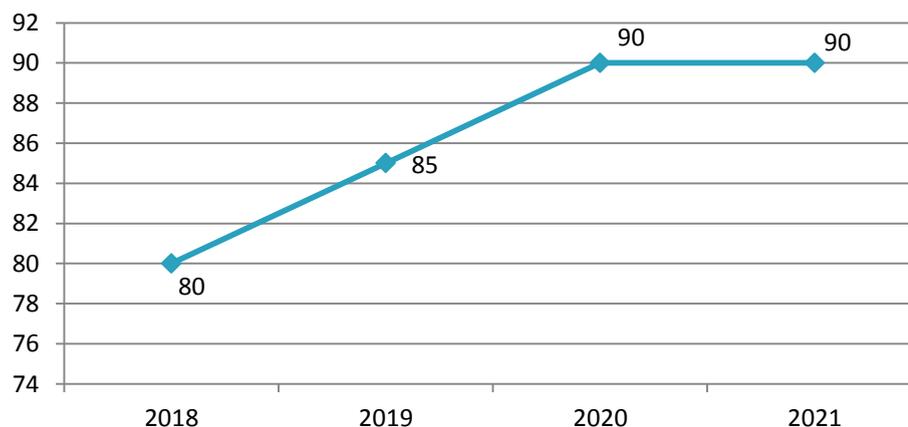
Tabel 13
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	80,00	85,00	90,00	90,00

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Grafik. 1
Perkembangan Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2018-2021





Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel 14
Realisasi Program Sasaran 3 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.190.299.000	610.645.000
Persentase		51,30%

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 51,30%. Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 48,07%.

4. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan 2 (dua) indikator kinerja adalah 33,80% dan termasuk predikat “**Sangat Rendah**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 15
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	70	10,17	33,90
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	70	10,11	33,70
Rata-rata Capaian			33,80

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Persentase Penurunan Pelanggaran K3 ini diukur dengan jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi tahun (n-1) – tahun (n) / jumlah pelanggaran K3 yang teridentifikasi tahun (n-1), dan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda diukur dengan jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi tahun (n-1) – tahun (n) / jumlah pelanggaran Perda yang teridentifikasi tahun (n-1).

Selama tahun 2021, jumlah kasus yang berhasil ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebanyak 698 kasus pelanggaran K3 dan 960 kasus terhadap pelanggaran Perda, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 pada pelanggaran K3 berhasil turun 10,17%, dan kasus pada pelanggaran perda menurun 108 kasus dari sebelumnya 1.068 kasus atau sebesar 10,11%. Walaupun terjadi penurunan terhadap pelanggaran, namun angka ini masih tinggi, hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang mana selama masa tersebut adanya larangan Pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan dalam usaha pencegahan penyebaran dan penularan virus Covid-19.



Jumlah kasus pelanggaran masing-masing indikator kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 16
Jumlah Kasus Pelanggaran Tahun 2018 - 2021

Indikator kinerja	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	1.200	900	777	698
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	193	188	1.068	960

Sumber data : Satpol PP dan Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Penurunan Pelanggaran K3	Persen	21,46	30	24	10,17
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Persen	48	50	-0.22	10,11

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Berdasarkan data diatas, rata-rata realisasi masing-masing indikator, pada tahun 2020 dan tahun 2021 masih rendah. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran K3 adalah 33,90% dan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda sebesar 33,70%. Dan rata-rata capaian sasaran tahun 2021 sebesar 33,80%. Rendahnya capaian ini dikarenakan beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas kebijakan *refocusing* anggaran guna penanganan dan pencegahan penularan Covid-19
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian ini antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penegakan perda
2. Melakukan patroli untuk mencegah kasus dalam rangka pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi.
3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi melalui penertiban sekaligus memberikan efek jera kepada lingkungan nya dan kemungkinan pengulangan kasus yang sama di kemudian hari.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dengan Program berikut ini:



Tabel 18
Realisasi Program Sasaran 4 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	1.888.910.000	1.545.636.000
Persentase		81,83%

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan sebesar 81,83% dalam pencapaian sasaran ini, besaran efisiensi anggarannya adalah 18,17%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 33,80%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai predikat “**Sangat Tinggi**” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19
Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kelengkapan administrasi kependudukan	97,5	94,44	96,86

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam



Upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Terutama dalam hal:

1. Pemenuhan hak asasi orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk (fungsi perlindungan).
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan sertadalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa penting kependudukan.
4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal.
5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi ataslaporan peristiwa penting kependudukan yang dialami penduduk, dengan memperhatikan kaidah registrasi dan diterbitkannya dokumen kependudukan.
6. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatansipil.



Persentase kelengkapan administrasi kependudukan merupakan rata-rata dari cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun). Pada tahun 2021, berdasarkan data diatas, capaian sebesar 96,86% menurun dibandingkan tahun sebelumnya 98,53% atau sebesar 1,69%. Menurunnya capaian ini tidak serta merta bahwa kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan menurun, sebagaimana dari jumlah realisasi yang artinya terdapat peningkatan kepemilikan KTP pada 788.794 penduduk yang sudah memiliki KTP dibandingkan dengan penduduk wajib KTP Kota Batam sejumlah 796.062 orang. Begitu juga cakupan pada penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun) Kota Batam sebanyak 344.248 orang dibanding dengan jumlah penduduk usia 0 s/d 18 tahun sebanyak 383.442 orang. Realisasi indikator kinerja pada capaian masing-masing cakupan pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 20
Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran
Tahun 2018 – 2021

Data Pemenuhan Persentase Kelengkapan Administrasi Kependudukan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Cakupan Penerbitan KTP	96,23	97,02	97,09	99,09
Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 s/d 18 tahun)	83,89	88,28	89,13	89,78
Rata-rata Capaian	90,06	92,65	93,11	94,44

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Batam

Berdasarkan data di atas, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam terhadap target akhir RPJMD belum berhasil mencapai 100%. Hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/Instansi/Kecamatan/Desa atau Kelurahan sebagai data kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala Kabupaten/Kota.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Masih terbatasnya anggaran penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



Selain beberapa kendala yang telah disebutkan diatas, masih terdapat kendala teknis, yaitu:

1. Masih lambatnya proses penunggalan data oleh server pusat di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga banyak penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el belum bisa dicetak KTP-el karena masih berstatus *Sent For Enrollment* (SFE).
2. Terjadinya keterbatasan pendistribusian blanko keping KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga pencetakan KTP-el bagi penduduk yang telah berstatus *Print Ready Record* (PRR) menjadi terlambat.
3. Terbatasnya alat pencetakan KTP-el yang hanya terdapat 1 unit di tiap Kecamatan sehingga terjadi penumpukan permohonan cetak KTP-el di Kecamatan.
4. Masih sering terjadinya permasalahan pada koneksi jaringan dengan SIAK Pusat, sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan seperti perekaman dan pencetakan KTP-el.

Dalam menghadapi hambatan dan kendala teknis yang terjadi, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar



Perangkat Daerah/Instansi/Kecamatan.

3. Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah/Instansi/Kecamatan/ Kelurahan.
4. Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui usulan tambahan anggaran dalam rangka peningkatan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui bimbingan teknis.
6. Melakukan pengiriman data yang masih berstatus *Sent For Enrollment* (SFE) secara berulang-ulang, terutama pada waktu malam hari atau hari libur agar proses penunggalan data penduduk dapat dilakukan.
7. Memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan kepada masyarakat yang berstatus *Print Ready Record* (PRR) sambil menunggu ketersediaan blanko KTP-el untuk dapat dicetak kepada masyarakat yang telah mendapat Surat Keterangan tersebut.
8. Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
9. Menambah peralatan pencetakan KTP-el di tiap Kecamatan.

Adapun program dan jumlah anggaran yang mendukung pencapaian sasaran adalah:



Tabel 21
Realisasi Program Sasaran 5 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	508.453.000	322.782.015
Persentase		63,48%

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana program yang digunakan untuk mencapai sasaran sebagaimana tabel diatas sebesar 63,48%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,86%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 36,52%.

6. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG BAIK”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai predikat “**Sangat Tinggi**” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 22
Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,50	13,17	97,56
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	12	11,15	92,92
Rata-rata Capaian				95,24

Sumber data : BPS Kota Batam

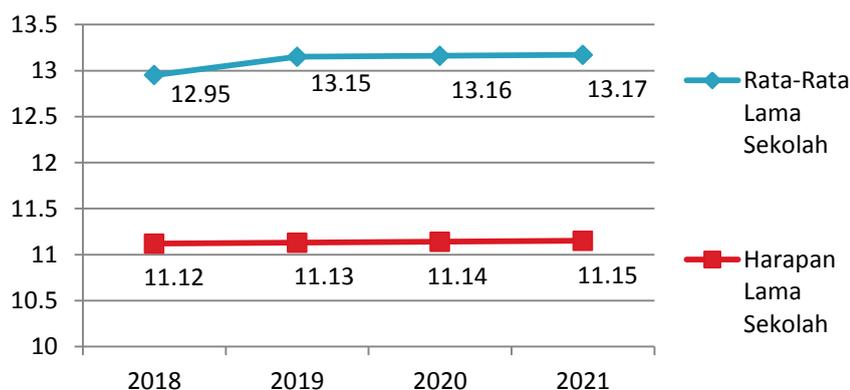
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara **Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.



Pada tahun 2021, angka Harapan Lama Sekolah Kota Batam terealisasi 13,17 tahun dari target 13,50 tahun, sehingga capaiannya sebesar 97,56%. Dengan capaian ini berarti anak-anak usia 7 tahun di Kota Batam memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sementara angka rata-rata lama sekolah Kota Batam terealisasi 11,15 tahun dari target 12 tahun, dengan capaiannya sebesar 92,92%. Rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 cenderung meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, sehingga dapat menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kota Batam semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:



Grafik. 2
Angka Rata-rata Lama Sekolah dan
Harapan Lama Sekolah Kota Batam tahun 2018 – 2021



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 23
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 tahun 2018 - 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,95	13,15	13,16	13,17
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	11,12	11,13	11,14	11,15

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Berdasarkan data diatas, pemerintah Kota Batam telah mencapai 97,56% angka harapan lama sekolah terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2021, begitu juga terhadap angka rata-rata lama sekolah, telah mencapai 92,92% dari target akhir RPJMD di tahun 2021.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni)		APK (Angka Partisipasi Kasar)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI	99,17	99,33	105,10	105,78
SMP/MTs	89,53	88,78	96,64	95,05
SMA/SMK/MA	72,64	71,31	85,30	83,94

Sumber data : BPS Kota Batam



3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan BOSDA Propinsi dan BOSDA Kota untuk jenjang pendidikan SD, SMP, yang digunakan untuk pembelian buku, honorarium guru dan pegawai tidak tetap, evaluasi pembelajaran, alat tulis kantor, langganan jasa dan pemeliharaan ringan sarana prasarana.
4. Pembinaan kreativitas siswa baik akademik (Olimpiade Sains, karya tulis ilmiah remaja), maupun non akademik (seni, olah raga).
5. Pemberdayaan kelompok kerja kepala sekolah (SD) dan musyawarah kerja kepala sekolah (SMP) dalam membangun kemitraan dan pendampingan siswa terutama menghadapi sukses ujian nasional, mengatasi kenakalan siswa, dan membangun karakter siswa.
6. Jumlah sekolah dan murid yang ada di Kota Batam:
 - a) Sekolah TK berjumlah 371 dengan murid 10.507 orang, meliputi 19 TK Negeri dengan jumlah murid 681 orang dan 352 TK Swasta dengan jumlah murid 9.826 orang.
 - b) RA berjumlah 114 dengan jumlah murid 3.928 orang.
 - c) SD berjumlah 371 sekolah dengan murid 133.982 orang, meliputi 144 SD Negeri dengan jumlah murid 74.996 orang dan 227 SD Swasta dengan jumlah murid 58.986 orang.
 - d) MI berjumlah 35 sekolah dengan murid 7.940 orang, meliputi 2 MI Negeri dengan jumlah murid 1.651 orang dan 33 MI Swasta dengan jumlah murid 6.289 orang.
 - e) SMP berjumlah 190 sekolah dengan murid 57.199 orang, meliputi 64 SMP Negeri dengan jumlah murid 39.589 orang dan 126 SMP Swasta dengan jumlah murid 17.610 orang.



- f) MTs berjumlah 25 sekolah dengan murid 3.747 orang, meliputi 3 MTs Negeri 22 MTs Swasta dengan jumlah murid 3.747 orang.
7. Keberadaan guru sekolah dengan kualifikasi kelayakan mengajar meliputi:
- a) Guru TK berjumlah 1.394 orang, meliputi 74 orang guru negeri dan 1.320 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Guru RA berjumlah 516 orang guru swasta yang berada Kementerian Agama.
- c) Guru SD berjumlah 6.314 orang, meliputi 2.773 orang guru negeri dan 3.541 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d) Guru MI berjumlah 35 orang, meliputi 2 orang guru negeri dan 33 orang guru swasta yang berada dibawah Kementerian Agama.
- e) Guru SMP berjumlah 2.867 orang, meliputi 1.522 orang guru negeri dan 1.345 orang guru swasta, yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f) Guru MTs berjumlah 331 orang, meliputi 44 orang guru negeri dan 287 orang guru swasta yang berada dibawah Kementerian Agama.





Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran adalah

Tabel 24
Realisasi Program Sasaran 6 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	370.037.352.308	287.239.667.327
2.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	32.446.896.608	2.702.222.796
3.	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	7.676.501.120	2.534.760.000
Total		410.160.750.036	292.476.650.123
Persentase			71,31%

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana program yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebesar 71,31%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 28,69%, Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,24%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



7. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU DAN MERATA”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator dengan predikat “**Sangat Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 25
Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021

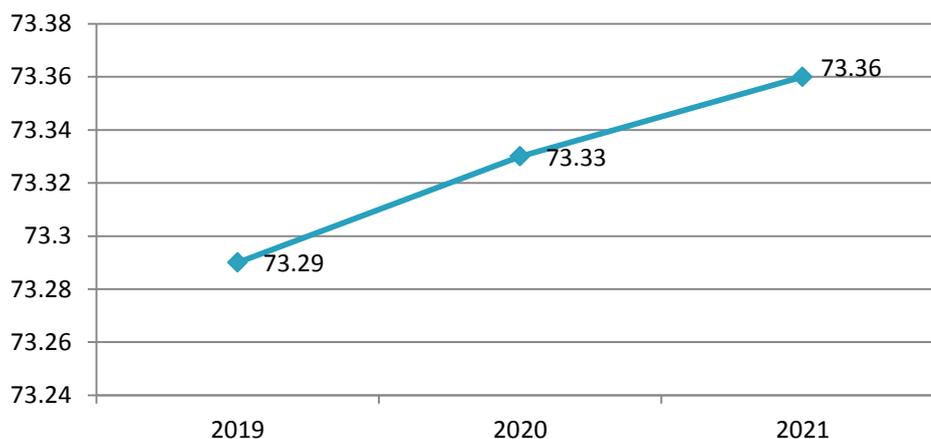
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,90	73,36	100,63

Sumber data : BPS Kota Batam

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya, sehingga kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Pada tahun 2021 pencapaian Angka Harapan Hidup di Kota Batam mencapai 100,63% dari target 72,90 tahun dapat terealisasi 73,36 tahun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan UHH Provinsi yakni 70,12 tahun (data BPS Prov. Kepri).



Grafik. 3
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Batam
Tahun 2019-2021



Sesuai data diatas, menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Batam terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam, antara lain:

1. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat (GERMAS) serta mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).
2. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendorong terwujudnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.
4. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan perbekalan kesehatan.

5. Mengembangkan kebijakan dan meningkatkan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah dan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin.
6. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta terwujudnya lingkungan sehat di masyarakat.
7. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu serta penyebaran sumber daya kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Usia Harapan Hidup masyarakat antara lain:

1. Angka kematian ibu pada tahun 2021 berjumlah 54 orang dari 27.809 kelahiran hidup sehingga angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) mencapai 0,19% yakni $194,18/100.000$ kelahiran hidup, hal ini menunjukkan tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu di Tahun 2021 telah berhasil.

2. Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (KH) di Kota Batam selama tahun 2021 sebesar 5,54/1.000 Kelahiran Hidup (154 Kematian bayi). Angka ini lebih baik karena lebih kecil dari target 17%, hal ini menunjukkan bahwa upaya promotif, preventif seperti kelas ibu hamil, kelas ibu balita, akses jaminan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin melalui Jampersal ataupun Jamkesda serta program lainnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi.



Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Terjadinya pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Dan hal ini masih berlanjut hingga tahun 2021. Sektor kesehatan sangat berperan dalam menghadapi Pandemi Covid 19, termasuk risiko penularan yang sangat tinggi bagi tenaga kesehatan.



2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai ketenagaan yang dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya 5 (lima) tenaga teknis (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan lingkungan, Ahli Gizi, Kefarmasian dan Analis Kesehatan), distribusi tenaga tidak merata dan tidak sesuai dengan informasi kebutuhan;
3. Kurangnya tenaga administrasi di puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan dan gizi) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain), sehingga mengganggu tugas pokok sebagai tenaga fungsional kesehatan
4. Lemahnya koordinasi lintas program dan sektoral dalam pelaksanaan penyelenggaraan program/kegiatan kesehatan, sehingga pelaksanaan program kurang optimal ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan lintas sektor yang sudah direncanakan jadi terkendala.
5. Semakin rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan diperparah dengan adanya pandemic Covid 19.
6. Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan terutama fasilitas kesehatan swasta.
7. Dampak Globalisasi, *sudentary Life Style* dan terjadinya pandemi Covid 19 dengan adanya fisical distancing adaptasi dengan new normal atau lebih baik dirumah untuk menghindari Covid 19 menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes melitus, penyakit kanker, hipertensi dan PTM lainnya.

8. Ditemukan beberapa kasus baru kusta pada beberapa wilayah kerja puskesmas.
9. Sulitnya melakukan surveilans terhadap gangguan gizi pada masyarakat terutama pada balita, baik kasus gizi butuk, *stunting* dan *wasting* pada masa pandemi Covid 19.
10. Sulitnya melakukan surveilans terhadap penyakit penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan karena pandemi Covid 19.
11. Upaya promotif dan preventif sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat tidak optimal karena keterbatasan gerak langkah akibat pandemi Covid 19.
12. Upaya pencapaian lingkungan sehat, kota sehat dan pemukiman sehat tidak dapat terlaksana akibat Pandemi Covid 19.



Strategi yang dilakukan dalam permasalahan tersebut antara lain:

1. Melakukan upaya penanganan dan upaya pencegahan Covid 19, serta rekomendasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.



2. Melakukan advokasi pada stakeholder untuk mendapatkan dukungan penambahan tenaga, anggaran, sarana dan prasarana kesehatan.
3. Penerapan PPK BLUD pada puskesmas sehingga puskesmas dapat mengatur kebutuhannya secara mandiri termasuk dalam pemenuhan tenaga non kesehatan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan sarana IT yang ada seperti WA, Email dan zoom meeting atau melaksanakan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
5. Penguatan peran serta masyarakat dengan pemberdayaan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan puskesmas dilapangan.
6. Meningkatkan penggunaan sistem IT dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan.
7. Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk melakukan aktifitas/olah raga dirumah dan menjaga stamina.
8. Meningkatkan upaya surveilans kusta dengan mendeteksi kontak primer dan kontak tetangga dan pemberian pengobatan program kusta.
9. Menggunakan data yang ada untuk kasus gizi dan melanjutkan pemantauan gizi balita dengan mengoptimalkan fungsi kader dilapangan.
10. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan pesan pesan kesehatan melalui spanduk, media elektronik, media komunikasi, seperti Whatsapps, SMS, dll.



11. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta dalam pencatatan dan pelaporan dengan memanfaatkan tenaga teknologi dan informasi.
12. Tetap menjaga dan memonitoring kesehatan lingkungan dan koordinasi secara online.

Realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 sebagai target kinerja RPJMD sebesar 72,90 tahun telah mencapai 100,63% atau sudah melebihi target dan telah dicapai sejak tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 26
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 tahun 2019 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,29	73,33	73,36

Sumber data : BPS Kota Batam

Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel. 27
Realisasi Program Sasaran 7 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.270.164.264	18.613.272.697



2.	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	24.994.275.574	14.432.319.980
3.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	19.270.515.050	33.423.996.833
4.	Program Jaminan Kesehatan Daerah	26.471.943.200	24.574.075.284
5.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan	11.048.254.150	5.796.659.890
6.	Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat	9.392.511.600	6.137.679.920
7.	Program Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	130.588.930.632	21.165.466.588
Total		246.036.594.470	124.143.471.192
Persentase			50,46

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Capaian realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 50,46%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 49,54%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,63%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



8. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN KUALITAS PERAN GENDER”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Peran Gender” dengan 2 (dua) indikator termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”.

Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 28
Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,54	94,43	99,88
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,05	59,10	96,10
Rata-rata Capaian				97,99

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Indeks Pembangunan Gender atau IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Sedangkan perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi.



Dalam memahami IPG dan IDG di Kota Batam, tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam berupaya terus melakukan peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat agar tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Hasil upaya tersebut dapat digambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

Tabel. 29

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2019 – 2021

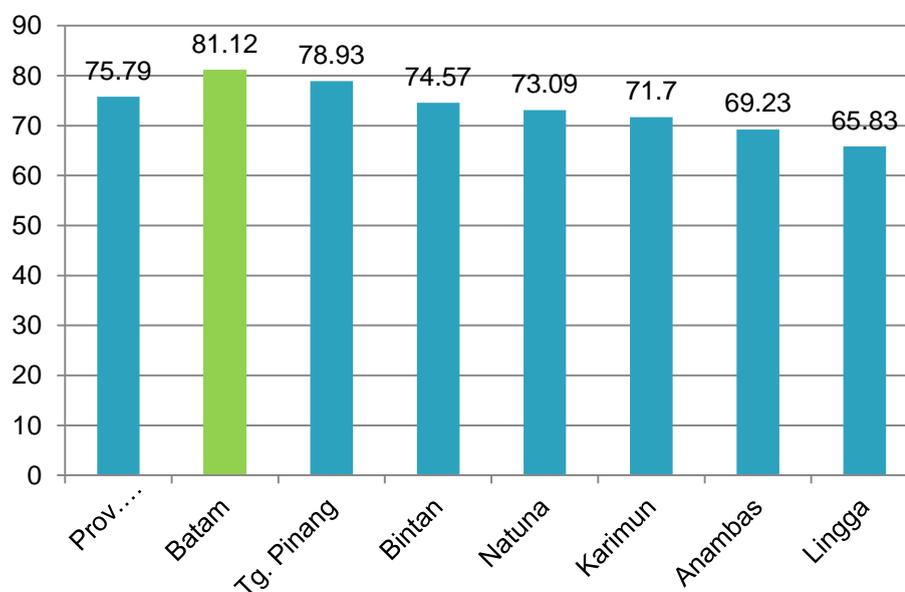
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam	Tahun		
	2019	2020	2021
	81,09	81,11	81,12

Sumber data : BPS Kota Batam



Berdasarkan data diatas, capaian IPM Kota Batam terus meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 capaian IPM Kota Batam ini berada pada peringkat 1 se Provinsi Kepri. Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2020 dan 2021 dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 4
Perbandingan IPM Kota Batam Tahun 2021
dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sejak tahun 2015 penghitungan IPM mengalami perubahan metode, sehingga perubahan ini berdampak pada penghitungan IPG dan IDG. Angka IPG dan IDG dipublikasikan oleh Kementerian PPA melalui buku Pembangunan Manusia berbasis Gender pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021, angka IPG Kota Batam tercatat 94,43 sementara itu capaian IDG di Kota Batam tercatat sebesar 59,10. Perkembangan IPG dan IDG Kota Batam dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

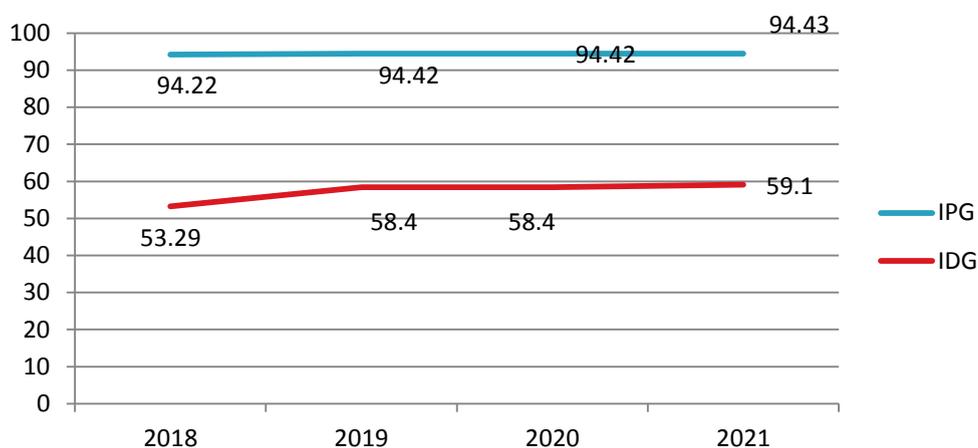


Tabel. 30
Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,22	94,42	94,42	94,43
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,29	58,40	58,40	59,10

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Grafik. 5
Pertumbuhan IPG - IDG Kota Batam Tahun 2018 – 2021



Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel. 31
Realisasi Program Sasaran 8 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.387.601.600	1.312.047.600
Persentase		94,56

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 94,56%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,99%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 5,44%.

9. Analisis Kinerja Sasaran “PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 89,11% dan termasuk predikat “**Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 32
Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tingkat Kemiskinan (Penduduk Miskin)	%	4,5	5,05	89,11

Sumber data : Bapelitbangda dan BPS Kota Batam

Persentase tingkat kemiskinan yang diukur pada sasaran ini adalah persentase penduduk di Kota Batam yang berada dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dari angka 5,05% ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Batam ada



sebanyak 77,17 ribu orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 740.109,00. Terjadi peningkatan sebesar 6,32% apabila dibandingkan dengan tahun 2020.

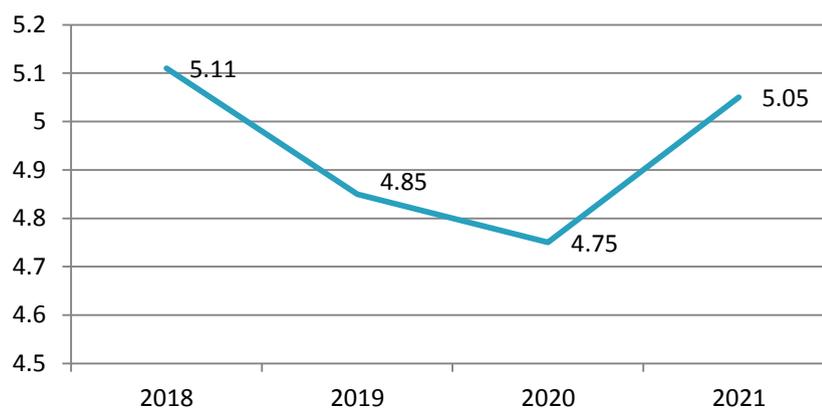


Salah satu permasalahan Kota Batam dalam hal kemiskinan, yaitu bukan pada tingginya angka kemiskinan, melainkan pada besarnya jumlah penduduk miskin. Hal ini terjadi disebabkan pertumbuhan penduduk juga disertai dengan pertumbuhan penduduk miskin, walaupun pertumbuhan penduduk miskin ini masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kota Batam lebih banyak dipengaruhi oleh faktor migrasi penduduk dibandingkan dengan faktor lainnya (kelahiran dan kematian). Dengan demikian, permasalahan kemiskinan makro Kota Batam, juga masih terkait dengan permasalahan kependudukan. Jika dilihat dari penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi *Covid-19* tidak memiliki pengaruh pada persentase penduduk miskin. Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Batam dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik. 6

Persentase penduduk miskin Kota Batam 2018 – 2021



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun dari 2019 hingga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 33

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Tingkat Kemiskinan	5,11	4,85	4,75	5,05

Sumber data : BPS Kota Batam

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih ada yang tumpang tindih satu sama lain,
3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas,

4. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas,
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Pemberdayaan terhadap Masyarakat masih belum maksimal, sehingga belum terdayagunakan secara optimal
9. Pemberdayaan terhadap kelembagaan keluarahan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum memadai.



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan persentase tingkat kemiskinan dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan dari pemerintah Kota Batam sendiri diantaranya:

1. BNPT/ Bantuan Pangan Non Tunai
2. Beasiswa pendidikan bagi siswa tidak mampu/KIP
3. PBI/ pembayaran iuran BPJS
4. Jamkesmas melalui KIS
5. Bantuan alat tangkap nelayan
6. Pelatihan koperasi dan usaha kecil
7. Beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu
8. Pelatihan wirausaha kepada keluarga tidak mampu
9. Bantuan mesin dan kapal nelayan
10. Sembako murah.

Dan berbagai program yang telah dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Program Keluarga harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (PKM), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesda.





10. Analisis Kinerja Sasaran “MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 51,55% dan termasuk predikat “**Rendah**”. Data capaian kinerja sasaran ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 34
Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat pengangguran terbuka	%	6	11,64	51,55

Sumber data : BPS Kota Batam

Semakin besar angka Tingkat Kesempatan Kerja, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka justru menunjukkan semakin tingginya orang yang tidak bekerja disuatu wilayah atau menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja fokus pada pemberian dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja dan pelaku industri dengan berupaya menciptakan inovasi dan pembekalan bagi tenaga kerja. Sehingga diharapkan masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja dapat mempunyai ketrampilan dan mampu mendapatkan lapangan pekerjaan atau mendirikan usaha sendiri, sedangkan bagi pelaku industri diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga menambah tenaga kerja yang secara otomatis menambah jumlah lapangan kerja baru.



Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam pada tahun 2021 berada pada tingkat 11,64% turun sebesar 1,27% dari tahun 2020. Dengan capaian kinerja adalah 51,55% atau terdapat 87.903 orang pengangguran yang ada di Kota Batam yang tidak terserap pada pasar kerja dibandingkan dari jumlah angkatan kerja sebanyak 745.545 orang. Rendahnya capaian sasaran ini disebabkan berbagai faktor diantaranya:

1. Pandemi covid 19 yang berpengaruh signifikan pada penurunan produksi baik barang/jasa diseluruh sektor lapangan usaha di Kota Batam, hal ini berdampak pada pengurangan pekerja dan PHK yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah perusahaan guna melakukan efisiensi pengeluaran di masa pandemi covid 19.
2. Pendapatan UMKM yang menurun di masa pandemi covid 19 mengakibatkan tidak sedikit usaha rumah tangga yang tutup.
3. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya bahwa jumlah pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja masih rendah pada tahun sebelumnya, sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2021.
4. Jumlah ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerja dan hal ini berdampak permintaan tenaga kerja menjadi lebih sedikit.
5. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai untuk menyelesaikan pengangguran terbuka.



Berdasarkan uraian faktor penyebab rendahnya capaian ini, maka Pemerintah Kota Batam berupaya:

1. Memberikan bantuan dana kepada UMKM dan usaha rumah tangga.
2. Meningkatkan protokol kesehatan pada seluruh kegiatan usaha di Kota Batam.
3. Menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor sektor lapangan kerja yang berada di Kota Batam serta memberdayakan kewirausahaan di daerah seperti UMKM.
4. Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta membangun minat investor untuk menanamkan modalnya.
5. Membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja.
6. Menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah.



- Melaksanakan reviu dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun dari 2019 hingga tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 35

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun 2018 – 2021

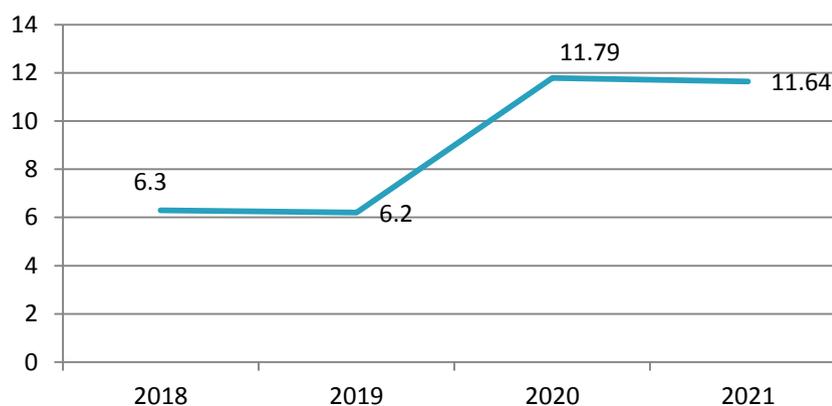
Indikator Kinerja	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Tingkat pengangguran terbuka	6,3	6,2	11,79	11,64

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2018 sampai tahun 2021 di Kota Batam dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik. 7

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2018 - 2021





Sasaran tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

Tabel. 36
Realisasi Program Sasaran 10 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	12.496.804.800	12.217.268.570
Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis	222.865.000	201.625.000
Total	12.719.669.800	12.418.893.570
Persentase		97,64

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 97,64%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 2,36%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 51,55%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

11. Analisis Kinerja Sasaran “TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA YANG KONSISTEN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 82,36% dan termasuk predikat “**Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 11 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel. 37
Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	%	95	78,24	82,36

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Ruang lingkup pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Saat ini Kota Batam telah menyelesaikan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119). Selain itu Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847), sehingga untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang Kota Batam belum bisa optimal dilaksanakan.



Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah di perlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.



Solusi yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan



program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran, antara lain:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Pengawasan bangunan dan Menara dilakukan secara kontinyu guna membangun kesadaran masyarakat dalam hal membangun sesuai Tata Ruang dan IMB.
2. Pengawasan rutin yang dilakukan dapat berupa memberikan surat teguran/peringatan bagi yang tidak sesuai aturan.
3. Keterlibatan perangkat daerah dari terkecil yakni RT/RW, pihak Kelurahan sampai Kecamatan, hal ini merupakan sarana yang sangat efektif menyampaikan pesan dan informasi mengenai kesesuaian dalam membangun sesuai dengan Tata Ruang dapat segera disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Berikut daftar dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dihasilkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama Tahun 2021.

Tabel. 38
Rekapitulasi Dokumen Tata Ruang Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Dokumen
1.	Penetapan Perwako RDTR 7 BWP	1 Dokumen
2.	Penyusunan Perwako RDTR Sei. Beduk	1 Dokumen
3.	Penyusunan Perwako RDTR Sagulung	1 Dokumen
4.	Penyusunan Perwako RDTR Belakang Padang	1 Dokumen
5.	Kajian awal ranperwako Insentif/ Disinsentif dan sanksi	2 Dokumen
6.	Peraturan teknis (Pertek) KRK	48 Dokumen
7.	Informasi Tata Ruang	78 Dokumen
8.	Aplikasi informasi administrasi penataan dan pemanfaatan dan pengelalaian tata ruang	1 Aplikasi/Dokumen
JUMLAH		132 Dokumen 1 Aplikasi

Sumber data : Dinas CKTR Kota Batam





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 39
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 tahun 2018 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tata kota dengan RTRW	%	85	90	95	78,24

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui program sebagai berikut:

Tabel. 40
Realisasi Program Sasaran 11 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	3.511.795.000	3.007.722.700
2.	Program Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	71.554.842.600	68.167.087.343
Total		75.066.637.600	71.174.810.043
Persentase			94,82

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 94,82%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 5,18%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 82,36%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



12. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 104,98% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 12 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 41
Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	%	67	72,50	108,21

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota menggunakan rumus $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$, dimana IKL adalah komposit Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Berdasarkan perhitungan akan diperoleh kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



Tabel. 42
Nilai IKLH dan Kategori

No.	Nilai IKLH	Kategori
1.	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
2.	$70 \leq x < 90$	Baik
3.	$50 \leq x < 70$	Sedang
4.	$25 \leq x < 50$	Kurang
5.	$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber data : Permen. LH dan Kehutanan RI No. 27 Tahun 2021

Namun perhitungan pada laporan ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 dengan Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam didapat dari 30% IKA + 30% IKU + 40% IKTL, dimana IKA = square root $(C_i/L_{ij})^2$ rata-rata + $(C_1/L_{ij})^2$ Maksimum/2, IKU = $100 - (50/0.9X(leu-0.1))$, IKTL = $100 - ((84.3 - (THX100))X50/54.3)$. Berikut disajikan tabel penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi rujukan hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Batam.

Tabel. 43
Nilai dan Predikat IKLH

No.	Nilai IKLH	Predikat
1.	$100 \% \leq$	Sangat Baik
2.	80 – 99 %	Baik
3.	70 – 79 %	Cukup
4.	$\leq 69 \%$	Kurang

Sumber data: Permen. Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016

Pada tahun 2021 IKLH Kota Batam mencapai 72,50% dari target yang ditetapkan 67% sehingga kinerja terhadap sasaran sebesar 108,21% meningkat sebesar 3,08% dari capaian tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2021 masih berpredikat “**CUKUP**”.

Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan, yakni:

1. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait (eksternal) mengenai pengelolaan lingkungan
2. Kurangnya database dan lemahnya pengelolaan database tersebut.
3. Adanya rasionalisasi anggaran terhadap Perangkat Daerah akibat *refocusing* anggaran terkait penanganan pandemi covid-19.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Batam yang telah dilakukan terhadap capaian realisasi ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
2. Mencegah pengupasan lahan
3. Melakukan rehabilitasi lingkungan
4. Sosialisasi peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pembangunan lingkungan
5. Pengembangan kawasan hijau serta kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkat kualitas lingkungan hidup.



Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun 2018 - 2021 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

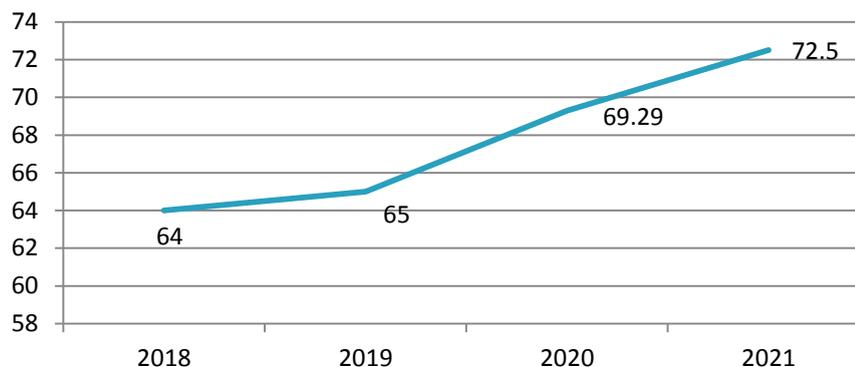
Tabel. 44

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam	%	64	65	69,29	72,50

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Grafik. 8
Pertumbuhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Batam
Tahun 2018 – 2021



Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui program dan penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel. 45
Realisasi Program Sasaran 12 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.073.239.625	2.006.512.842
Persentase		96,78

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Dengan realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 92,73%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 108,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 3.22%.

13. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDIANYA PENGELOLAAN SAMPAH PADA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 13 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 46
Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	%	100	100	100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Kinerja sasaran ini dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, Penanganan Kebersihan Jalan, Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan, serta Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, pada tahun 2021 ini diketahui penyelenggaraan pelayanan sebagaimana

disebutkan sebelumnya dilaksanakan dengan menghitung beberapa kegiatan, antara lain volume sampah yang terangkut ke TPA adalah 794 ton per hari, penanganan kebersihan jalan sebanyak 200 lokasi, dan panjang pembersihan drainase, parit dan selokan yang dibersihkan mencapai 440 Km, begitu pula Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur dengan target 90% dapat terealisasi 90%, sehingga semua capaian kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini mencapai 100%. Namun dalam pencapaian tersebut, masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan.
2. Belum semuanya memiliki SOP dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing pegawai sehingga kinerja yang dihasilkan juga belum maksimal.
3. Belum optimalnya kinerja PPLHD dan PPNS serta adanya mutasi staf yang kurang memperhatikan keahlian yang dibutuhkan.





Penanganan sampah dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Oleh karena itu, penanganan sampah menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Batam. Walaupun capaian pada realisasi ini dari tahun ke tahun sudah menunjukkan capaian yang sangat baik, Pemerintah Kota Batam terus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA .
2. Mengubah sampah organik menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali dan tidak menimbulkan polusi baru.
3. Membuat program bank sampah pada beberapa titik tempat pembuangan sampah/TPS sehingga sampah dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dengan program Bank Sampah, sampah kering dapat terpilah dengan sendirinya dan dapat didaur ulang kembali.
4. Penanganan sampah dilakukan dengan melakukan pelayanan pengangkutan sampah, melakukan pemisahan/sortasi jenis sampah dan menerapkan teknik 3 R (reduse, reuse dan recycle).

Capaian Sasaran ini terhadap RPJMD merupakan realisasi pada tahun 2021 karena tahun ini adalah akhir periode RPJMD 2016 – 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 47

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 tahun 2018 - 2021

Indikator Sasaran	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	100	100	100	100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian pelaksanaan sasaran ini melalui program sebagai berikut:

Tabel. 48

Realisasi Program Sasaran 13 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	70.086.658.947	55.146.755.431
2.	Program Lingkungan Sehat	1.227.512603	1.168.953.118
Total		71.314.171.550	56.315.708.549
Persentase			78,97

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 78,97%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 21,03%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



14. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG TERPADU DAN NYAMAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 168,52% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 14 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 49
Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	14,55	38	261,17
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	81	87,50	108,02
Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	Titik	15	11	136,36
Total				168,52

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum.**

Pengukuran persentase ini diperoleh dari jumlah penumpang yang diangkut dibagi jumlah kapasitas tempat duduk penumpang dikali 100%. Dihitung dari jumlah penumpang Bus Trans Batam, Bus Sekolah, Kapal dan Speedboat yang melayani masyarakat baik mainland maupun hinterland. Tahun 2021 pelayanan bus Trans Batam sudah hampir dalam kondisi normal, namun minat masyarakat untuk kembali menggunakan Bus Trans Batam sebagai angkutan



umum massal masih belum kembali normal, jumlah bus yang beroperasi dalam sehari hanya sebanyak 30 Unit, karena untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 yang melanda dari mulai maret 2020, pemerintah melakukan pembatasan pergerakan penumpang yang dimulai dari awal tahun 2021. Tentunya hal ini berdampak dari jumlah penumpang angkutan massal dalam hal ini Trans Batam. Namun Bus Sekolah sudah beroperasi secara normal karena siswa-siswa sudah mulai bersekolah walaupun dengan batasan jam yang ditentukan oleh pemerintah. Jumlah penumpang yang diangkut selama tahun 2021 adalah berjumlah 1.567.217 meningkat sebanyak 19% dari tahun 2020 dengan rincian pada data sebagai berikut :

Tabel. 50
Jumlah Penumpang Yang Di Angkut Tahun 2018 - 2021

Jenis Angkutan	Jumlah Penumpang per tahun			
	2018	2019	2020	2021
Trans Batam	2.388.718	2.647.305	1.265.961	1.172.264
Bus Sekolah	2.273	65.250	117.348	371.840
Kapal	20.280	25.093	15.510	15.510
Total	2.411.271	2.737.648	1.313.241	1.567.217

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Batam



Untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia selama Tahun 2021 adalah sebanyak 4.137.360, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel. 51

Jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia Tahun 2021

Indikator Daya Angkut	Jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia		
	Trans Batam	Bus Sekolah	Kapal
Jumlah	30	8	4
Rit	10	2	2
Seat/Kendaraan	36	30	30
Hari	365	275	264
Jumlah	3.942.000	132.000	63.360
Total			4.137.360

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Batam

Dari data diatas diperoleh persentase layanan angkutan darat dan laut tahun 2021 adalah sebesar 38% atau meningkat sebesar 5% dari tahun 2020.



Pengelolaan Bus Trans Batam Terhitung Desember 2013 dikelola oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi, berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pembentukan UPT Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam. Untuk tahun 2021 Jumlah Koridor yang terealisasi masih sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 8 Koridor, dengan rute sebagai berikut :

1. Koridor Sekupang – Batam Centre yang melewati Sei Harapan – Tiban - UIB - Simp. Sei Panas - Kantor Walikota - Mega Mall
2. Koridor Tanjung Uncang – Batam Centre yang melewati Simpang Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Batu Aji - Simpang Barelang – Muka Kuning - Kepri Mall - Kantor Walikota - Mega Mall
3. Koridor Sekupang – Jodoh yang melewati Sei Harapan - Tiban - UIB - Simp. Baloi - Penuin - Nagoya - Simp. Mc Donald - Terminal Jodoh - DC Mall - Pasar Induk
4. Koridor Sagulung – Sekupang yang melewati Pelabuhan Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Marina - Tanjung Riau - Sei Harapan
5. Koridor Tanjung Piayu – Batam Centre yang melewati Piayu Laut – Simpang Bagan - Muka Kuning - Panbil - Kepri Mall - Kantor Walikota
6. Koridor Jodoh – Batam Centre yang melewati Harbourbay - Batu Ampar - Sei Panas – BNI
7. Koridor Nongsa – Batam Centre yang melewati Teluk Mata Ikan –



- Kapling Sambau - Simpang Batu Besar - Simpang Bandara - SMU
3 – Simpang Dotamana - Simpang Kantor Camat Kota Batam -
Simpang KDA – Mega Mall
8. Koridor Nongsa – Jodoh yang melewati Batu Besar - Sudirman –
Raden Patah - Nagoya Hill

Operasional Bus Sekolah selama lebih kurang 275 hari telah
mengangkut sebanyak 371.840 siswa yang tersebar di Kecamatan
Galang dengan Rute sebagai berikut:

1. Rute I : Dishub - Tembesi - Sijantung - Pulau Nguan - Air Lingka –
Tanjung Kertang
2. Rute II : Dishub - Tembesi - Kampung Baru – Tanjung Kertang
3. Rute III : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Sembulang – Sijantung
4. Rute IV : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Cate – Tanjung Kertang
5. Rute V : Dishub - Tembesi - Setokok – Sijantung
6. Rute VI : Dishub - Tembesi – Tanjung Kertang - Monggak –
Sijantung
7. Rute VII : Dishub - Dapur 6 – Tanjung Banun - Sei Buluh –
Sijantung
8. Rute VIII : Dishub - Tembesi - Sijantung – Tanjung Kertang

Penumpang yang dapat diangkut oleh Trans Laut adalah sebanyak
23.113 orang yang tersebar di daerah Galang dan Bulang, dengan
rute sebagai berikut :

1. Rute KM Sri Lenggang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat

- nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
 3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
 4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang



Beberapa faktor yang masih menjadi kendala pada perkembangan Trans Batam di kota Batam, yaitu :

1. Fasilitas publik angkutan umum massal seperti halte masih belum optimal, sehingga masyarakat pengguna kendaraan pribadi masih enggan untuk beralih ke angkutan umum massal.
2. Masih banyak nya terjadi perlawanan dari para pengemudi angkutan umum lainnya terkait dengan keberadaan Bus Trans Batam.



Realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2018 sampai dengan kinerja RPJMD pada tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 52

Realisasi Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	25,81	20,52	-0,52	38

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Batam

Program yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini melalui:

Tabel. 53

Realisasi Program Indikator Kinerja 1 Sasaran 14 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal	19.193.477.329	18.227.385.894
2.	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas	2.539.977.000	2.416.737.380
3.	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	7.682.243.743	5.708.054.497
Total		29.415.698.063	26.352.177.771
Persentase			89,59

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Realisasi anggaran sebesar 89,59%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 261,17%, maka penggunaan sumber daya dalam mencapai indikator tersebut efisien. Tingginya pencapaian ini juga dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang telah memberikan izin untuk melakukan aktivitas di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan akibat Pandemi COVID-19, sehingga pelayanan pemerintah tetap hadir dalam memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat.

2. Persentase jalan dalam kondisi baik.

Pada indikator ini, capaian diukur dengan panjang jalan yang dibangun, panjang jalan yang dipelihara dan panjang jalan yang dibangun di wilayah hinterland. Dengan capaian sebesar 108,02% dari target 81% terealisasi sebesar 87,5%. Pada angka ini menunjukkan bahwa panjang jalan yang berfungsi baik di Kota Batam bertambah sepanjang 20,75 km menjadi 780,94 km dibandingkan panjang jalan yang berkondisi baik pada tahun 2020 yakni 760,19 km, kondisi ini meningkat sebesar 2,73%. Dan capaian kinerja pada indikator Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2021 ini terhadap keseluruhan panjang jalan Kota Batam sebesar 882,57 km pencapaian ini sudah mencapai 88,48%.



Adapun persentase peningkatan dan peningkatan panjang jalan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 54

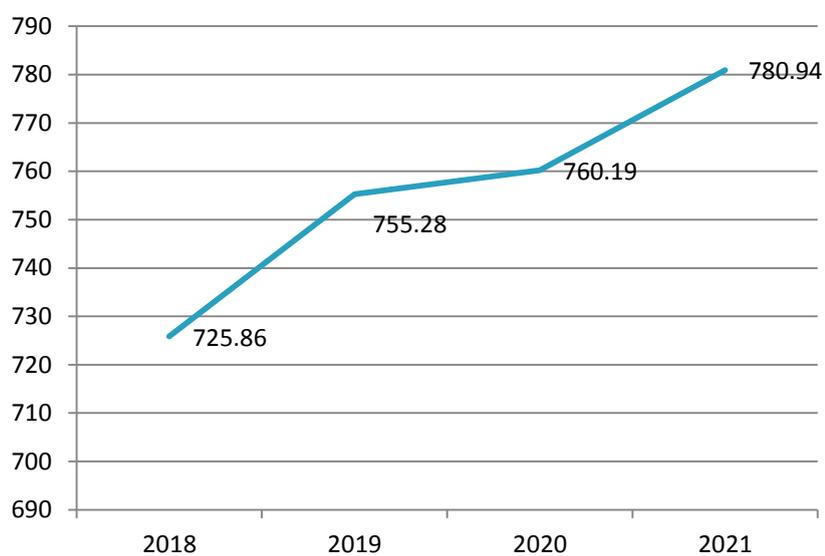
Realisasi Indikator Kinerja 2 Sasaran 14 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Panjang Jalan yang berfungsi Baik	%	74	76	87,31	87,5
Panjang Jalan yang berfungsi Baik	meter	725,86	755,28	760,19	780,94

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Grafik. 9
Peningkatan Panjang Jalan yang berfungsi Baik
Tahun 2018 – 2021





Pencapaian sasaran ini melalui Program

Tabel. 55

Realisasi Program Indikator Kinerja 2 Sasaran 14 tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Pelantar	138.457.888.556	130.459.367.702
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	57.727.452.641	57.727.452.641
Total		196.185.341.197	188.186.820.343
Persentase			95,92

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator ini sebesar 95,92%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 108,02%, maka penggunaan sumber daya efisien dalam mencapai kinerja indikator ini.



3. Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir.

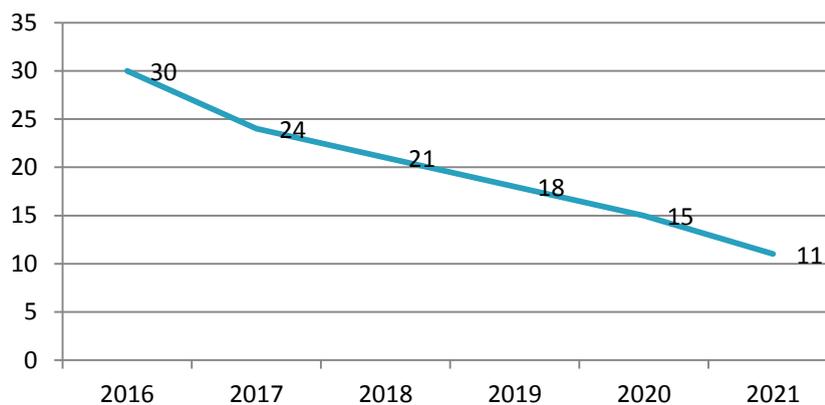
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini dihitung dari Jumlah titik genangan air/banjir di Kota Batam yakni 30 titik sebagai *baseline*. Pada tahun 2021 jumlah titik banjir yang mampu ditangani sebanyak 19 titik dari target 19 titik genangan air/banjir, sehingga hasil penurunan titik banjir yang berhasil ditangani sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 maka penanganan titik banjir terjadi peningkatan sebesar 26,67% karena pada tahun 2020 penanganan titik banjir mencapai 15 titik. Apabila dibandingkan dengan *baseline* titik banjir, pencapaian Pemerintah Kota Batam sudah berhasil mencapai 63,33%. Perkembangan pencapaian penanganan jumlah titik banjir pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Kota Batam dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel. 56
Realisasi Indikator Kinerja 3 Sasaran 14 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	titik	21	18	15	11

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Grafik. 10
Perkembangan penanganan titik banjir Kota Batam tahun 2016 – 2021





Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah tingginya komitmen Pimpinan untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur dalam mengatasi masalah perkotaan baik jalan maupun drainase. Pembangunan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas drainase diukur dengan panjang drainase yang dibangun dan panjang drainase yang dipelihara. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 5,77% atau sepanjang 55.000 meter yang sebelumnya pada tahun 2020 drainase terpelihara sepanjang 52.000 meter; termasuk juga pemeliharaan dalam peningkatan fungsi drainase serta penanganan abrasi pantai. Pencapaian indikator ini melalui Program:

Tabel. 57

Realisasi Program Indikator Kinerja 3 Sasaran 14 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan	23.559.416.183	21.769.911.974
Persentase		92,04

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi anggaran yang digunakan sebesar 92,04%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator sebesar 100%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya.

Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 ini, antara lain:

1. Terjadinya bencana non alam Covid-19 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan infrastruktur.

2. Adanya bangunan yang bermasalah serta beberapa utilitas pada lokasi pekerjaan yang berakibat pada mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Kualitas dan kompetensi dari penyedia jasa yang belum optimal dalam melaksanakan pekerjaan
4. Sumber daya manusia aparatur pada perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan.



Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Perlunya penyesuaian terkait target maupun pola pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan selektifitas kualitas dan kompetensi penyedia jasa konstruksi.



4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur perangkat daerah dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penetapan kinerja yang lebih cermat dan akurat terhadap tujuan yang ingin dicapai dan meminimalisir kemungkinan hambatan yang timbul.

Realisasi indikator kinerja sasaran Tersedianya Infrastruktur Perkotaan Yang Terpadu Dan Nyaman tahun 2019 sampai tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 58
Realisasi Kinerja Sasaran 14 Tahun 2019 – 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
Persentase peningkatan Jumlah pengguna transportasi umum	%	20,52	-0,52	38
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	76	87,31	87,5
Penurunan jumlah titik genangan air/ banjir	titik	18	15	11

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Pencapaian sasaran ini melalui Program:

Tabel. 59
Realisasi Program Sasaran 14 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal	19.193.477.329	18.227.385.894
2.	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas	2.539.977.000	2.416.737.380
3.	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	7.682.243.743	5.708.054.497
4.	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Pelantar	138.457.888.556	130.459.367.702
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	57.727.452.641	57.727.452.641
6.	Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan	23.559.416.183	21.769.911.974
Total		249.160.455.443	236.308.910.088
Persentase			94,84

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Rata-rata capaian realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah 94,84%. Realisasi keuangan ini jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 168,52%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Besaran efisiensi anggarannya adalah 5,16%.

15. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 102,72% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 15 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 60
Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	85,77	88,10	102,72

Sumber data : Dinas Perakimtan Kota Batam

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kota Batam tahun 2020 tercatat jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batam adalah sebanyak 35.397 rumah. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai program untuk menunjang pengurangan jumlah rumah tidak layak huni baik yang merupakan program dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Batam, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 228 unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 78 unit serta dari Satuan Kerja



Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 150 unit sehingga terjadi penurunan jumlah tidak layak huni menjadi 35.169 rumah. Secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 10,28% dari basis data terpadu. Terhadap target diakhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 86,42%, pencapaian kinerja ini sudah mencapai 101,94%. Rincian data capaian terhadap jumlah rumah tidak layak huni dan peningkatan persentase rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut:

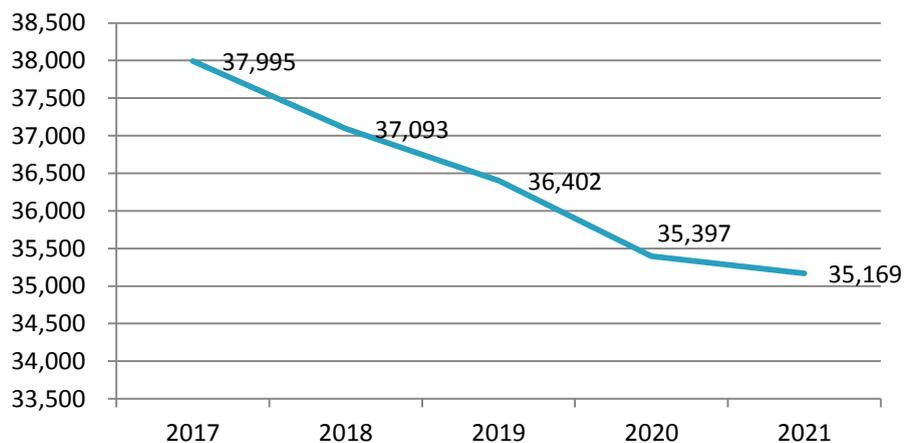
Tabel. 61
Data capaian berdasarkan Basis Data Terpadu 2015

BDT tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021
	1.133	603	991	1.005	228
39.901	37.996	37.393	36.402	35.397	35.169
	0,048	0,063	0,088	0,113	0,119
	4,77%	6,29%	9,00%	11,30%	11,90%

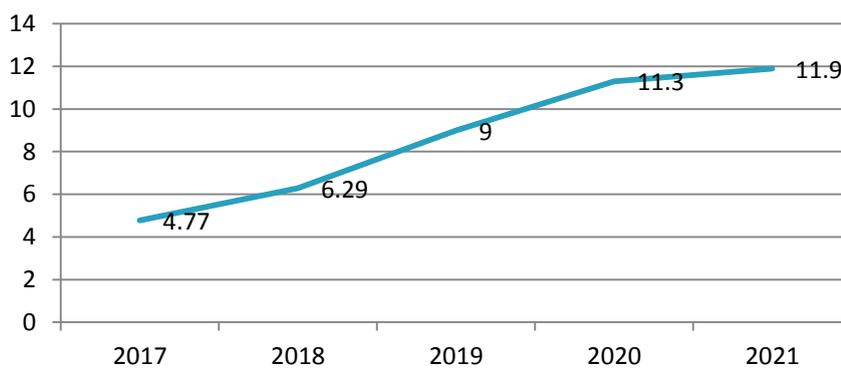
Sumber data : Dinas Perakimtan Kota Batam

Perkembangan pencapaian penurunan rumah tidak layak huni dan persentase rumah layak huni pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kota Batam dapat dilihat pada grafik-grafik berikut:

Grafik. 11
Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam
tahun 2017 – 2021



Grafik. 12
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam
tahun 2017 – 2021



Berdasarkan data diatas, capaian sasaran ini terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 62
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 tahun 2019 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		
		2019	2020	2021
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	89,33	89,66	88,10

Sumber data : Dinas Perakimtan Kota Batam



Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Maraknya rumah liar/bermasalah akibat dampak dari pengembangan menjadi Kota industri dan relatif tingginya harga rumah tinggal.
2. Kurang fokusnya sasaran kerja karena lemahnya database yang berguna untuk perencanaan.

3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau sehingga terjadi backlog kebutuhan rumah di Kota Batam.
4. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang mengakibatkan bertambahnya lingkungan permukiman kumuh.
5. Besarnya kebutuhan akan pemenuhan layanan publik seperti peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak diimbangi kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah sehingga intervensi yang dilakukan belum signifikan.
6. Belum maksimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan ruang terbuka publik maupun private.
7. Tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kesulitan penataan baik perumahan maupun lingkungan permukiman.
8. Kesenjangan pembangunan antara mainland dengan hinterland.





Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk dukungan pendanaan melalui bantuan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Upaya penambahan satuan rusun dengan bantuan pembangunan twinblok rusunawa baru.
3. Bantuan dari pemerintah provinsi untuk bantuan peningkatan RTLH di Kota Batam.

Sasaran ini dicapai melalui Program:

Tabel. 63

Realisasi Program Sasaran 15 tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Dasar Permukiman dan Perumahan	62.432.803.830	62.432.803.830
Persentase		100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,72%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



16. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 16 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 64
Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	%	42,94	59,61	138,82

Sumber data : Dinas Perindag Kota Batam

Pengukuran Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian didapat dari penghitungan $0,45 \times$ kinerja pembinaan perdagangan + $0,35 \times$ kinerja penataan pasar + $0,20 \times$ kinerja pembinaan IKM.

Pada kinerja pembinaan perdagangan melalui indikator Persentase Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan dan Persentase Tertib Ukur dengan keseluruhan target sebesar 28.67% terealisasi secara berurutan 24,66% dan 0,80%, sehingga pada Indikator Kinerja pembinaan perdagangan tercapai sebesar 25,46% atau dengan tingkat capaian 88,80%

Pada kinerja penataan pasar diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pasar dengan target yang



ditetapkan adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian yang didapat adalah 100%.

Sementara kinerja pembinaan IKM diukur dengan indikator Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah dengan target 27,06% dan terealisasi sebesar 65.78% dengan capaian 243,09%.

Berdasarkan data-data tersebut maka Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021 terealisasi 59,61%, dari target yang ditetapkan sebesar 42,94% maka capaian indeks ini adalah sebesar 138,82%. Pencapaian ini adalah keberhasilan atas langkah-langkah Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Dengan melaksanakan pola kerjasama swasta sehingga tidak membebani Anggaran Pemerintah Kota Batam, yakni :
 - Pembentukan Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
 - Percepatan Penanganan pandemi Covid_19 melalui kedesama dengan Distributor dan pengelola pasar se Kota Batam.
 - Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 melalui kerjasama dengan Distributor dan Pengelola Pasar se Kota Batam
 - Kerjasama Go-Jek melalui program IKM Batam Go-Digital yang dituangkan dalam Mou.



2. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, termasuk koordinasi dengan pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah pusat terkait Gudang pengelolaan cadangan pangan Pemerintah;
3. Mengembangkan komunikasi dan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah pusat terkait kewenangan yang terbatas pada Kabupaten/Kota namun langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat seperti di urusan bidang energi dan sumber daya mineral (BBM, LPG dan Kelistrikan)
4. Aktif melakukan pengoordinasian dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam dalam mengendalikan inflasi terhadap bahan kebutuhan pokok;
5. Melalui Kegiatan Dekranasda Kota Batam.
6. Mengembangkan Sentra Industri Mandiri yang berwawasan lingkungan;

Realisasi sasaran ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

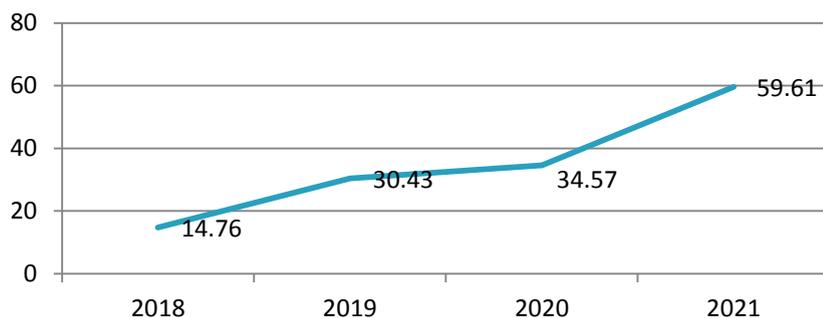
Tabel. 65
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 tahun 2018 -2021

Indikator Sasaran	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian	14,76	30,43	34,57	59,61

Sumber data : Dinas Perindag Kota Batam



Grafik. 13
Indeks Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam
tahun 2018 – 2021



Sasaran ini dicapai melalui beberapa program antara lain

Tabel. 66
Realisasi Program Sasaran 16 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.808.443.500	1.531.454.750
2.	Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar	5.084.101.779	4.171.094.349
Total		6.892.545.279	5.702.549.099
Persentase			82,74

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar 82,74% dari anggaran. Besaran efisiensi anggarannya adalah 17,26%, Apabila



dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 138,82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

17. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini pada Tahun 2021 belum dapat disampaikan, hal ini dikarenakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS Kota Batam belum dirilis. Data capaian kinerja sasaran 17 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 67

Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Length of Stay (Lama Kunjungan)	hari	2,09	n.a	n.a

Sumber data : Bapelitbangda dan BPS Kota Batam

Pencapaian kinerja pada indikator Length of Stay (Lama Kunjungan) yang dimaksud pada laporan ini adalah Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kota Batam di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu

1. Wisatawan (*tourist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit dua puluh empat jam, akan tetapi tidak lebih dari dua belas

(12) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi dan olahraga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.

2. Pelancong (*Excursionist*)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diartikan rata-rata lamanya tamu menginap di Kota Batam adalah banyaknya malam tempat tidur yang terpakai (malam tamu) dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel atau akomodasi lainnya.





Pada tahun 2020, seperti diketahui pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini masih berlanjut selama tahun 2021. Berdasarkan instruksi Presiden untuk mengurangi aktivitas di luar rumah serta pembatasan warga keluar dan masuk ke Negara Indonesia, maka sangat berdampak dalam program kepariwisataan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja di lingkup kepariwisataan, khususnya pada jumlah kunjungan dan lama kunjungan. Namun, Pemerintah Kota Batam tetap giat melakukan berbagai promosi dan event-event kepariwisataan yang dapat memberikan kontribusi meningkatnya wisata di Kota Batam dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat.

Berdasarkan data dari BPS Kota Batam, jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam selama bulan Desember 2021 tercatat sebanyak 313 kunjungan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 33,76 persen jika dibanding jumlah wisman bulan sebelumnya, dimana jumlah kunjungan wisman pada bulan November 2021 sebanyak 234 kunjungan. Namun, jika dibandingkan dengan Desember 2020, kunjungan wisman Desember 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 33,55 persen. Wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan Januari – Desember 2021 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura mencapai 15,69 persen dari jumlah wisman selama Januari sampai dengan Desember 2021. Secara kumulatif Januari – Desember 2021, jumlah kunjungan wisman ke Kota Batam mencapai 2.651



kunjungan atau turun 99,11 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebagai akibat masih merebaknya wabah Covid-19 yang berdampak pada sektor industri pariwisata Kota Batam. Realisasi sasaran ini dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 68

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Tahun 2018 – 2021

IndikatorSasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Length of Stay (Lama Kunjungan)	Hari	2,01	2,05	2,09	n.a

Sumber data : BPS Kota Batam

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencapai sasaran ini melalui program sebagai berikut:

Tabel. 69

Realisasi Program Sasaran 17 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Sektor Pariwisata	3.698.115.200	3.450.916.000
Persentase		93,32

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar 93,32%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 6,68%. Realisasi



keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang secara perencanaan tidak tercapai namun pengembangan dan kegiatan kepariwisataan tetap terlaksana dengan baik sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut tidak optimal.

18. Analisis Kinerja Sasaran “PENINGKATAN INVESTASI KOTA BATAM”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 169,94% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”.

Data capaian kinerja sasaran 18 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 70

Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Investasi	%	18,73	31,83	169,94

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pada tahun 2020, terlepas dari adanya situasi darurat Pandemi Covid-19, investasi di Kota Batam tetap berjalan dan meningkat, begitu pula pada tahun 2021 ini, nilai realisasi mencapai 31,83% dari target 18,73% dengan capaian sebesar 169,94%, Pemerintah Kota Batam menerima Rp. 14.578.291.400.000,- investasi modal yang terdiri dari Rp. 7.519.910.000.000,- nilai investasi PMDN dan Rp. 7.058.381.400.000,- nilai investasi PMA. Jika capaian tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 36,47%. Kondisi menurunnya capaian ini dipicu dengan adanya beberapa hal, antara lain:



1. Perubahan peraturan dan perundang-undangan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 41 tahun 2021.
2. Peralihan aplikasi OSS ke OSS *Risk Based Approach* (RBA) sesuai Surat Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021 sebagai amanat pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
3. Tingkat kesadaran penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal.
4. Belum tersedianya peta potensi penanaman modal.
5. Koordinasi bersama dinas teknis masih belum maksimal.
6. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi yang selaras dan optimal berdasarkan Permendagri RI Nomor 25 Tahun 2021 belum tersedia.
7. Kapasitas SDM yang mendukung kinerja masih belum optimal karena belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan fungsi yang sesuai.

Bedasarkan hal tersebut, solusi dan upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi di Kota Batam, antara lain:

1. Diterapkannya “KODE ETIK” bagi penyelenggara pelayanan perizinan.
2. Menyusun beberapa produk hukum terkait pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan, standar pelayanan, standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintahan Kota Batam.
3. Menerbitkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Rencana Umum Penanaman Modal

Kota Batam.

4. Menggesa penerbitan Peraturan Walikota tentang tugas dan fungsi yang selaras dan optimal berdasarkan Permendagri RI Nomor 25 Tahun 2021.
5. Meningkatkan mutu layanan prima yang diberikan kepada pelaku usaha.
6. Memberikan pembinaan dan fasilitas konsultasi terhadap pelaksanaan penanaman modal.
7. Memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM.

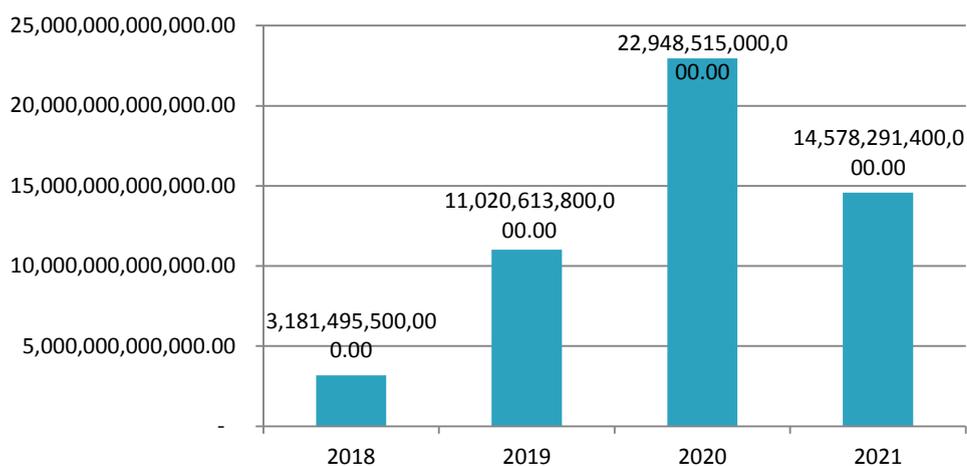


Adapun pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik. 14

Pertumbuhan nilai investasi Kota Batam dari tahun 2018-2021



Realisasi sasaran ini sampai dengan akhir RPJMD atau ditahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 71

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Investasi	%	17,7	18,03	105,90	31,83

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP mencapai sasaran ini melalui Program berikut ini:



Tabel. 72
Realisasi Program Sasaran 18 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan	1.232.615.600	1.022.856.175
Total		82,98

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar 82,98%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 17,02%, Realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 169,94%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

19. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATKAN SEKTOR PERTANIAN/PERIKANAN”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 92,35% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”.

Data capaian kinerja sasaran 19 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 73
Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	%	94,1	86,90	92,35

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan).

Skor PPH merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.



Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No. 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penyelenggaraan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kab/Kota mencakup 4 urusan dan 9 sub urusan antara lain pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Tercapainya penganeekaragaman konsumsi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Terkait dengan itu, perkembangan konsumsi pangan penduduk telah menjadi salah satu indikator kinerja unit kerja ketahanan pangan pada jenis pelayanan penganeekaragaman dan keamanan pangan pangan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, diharapkan tercapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, yang ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan sebesar 90% dari target skor PPH tahun 2015. Mengacu pada UU No. 16/1997 tentang Statistik dan PP No. 51/1999 tentang Kegiatan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas melakukan pengelolaan data statistik di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menyediakan data terkait pendidikan, kesehatan, konsumsi/pengeluaran rumah tangga serta sosial ekonomi lainnya yang diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, antara lain melaksanakan Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS).



Data rata-rata konsumsi pangan dan gizi penduduk hasil SUSENAS secara khusus BPS dipublikasinya untuk level nasional & provinsi dengan 3 klasifikasi wilayah, yaitu: perkotaan, perdesaan, & gabungan. Pada masing- masing tabel, disajikan pula menurut golongan pengeluaran. Terkait dengan analisis situasi konsumsi pangan penduduk berdasarkan data SUSENAS, secara metodologis terdapat dua hal yang dapat kecenderungan yang dapat mempengaruhi hasil analisis, yaitu:

- Metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi data konsumsi pangan yang diingat oleh responden;
- Ketersediaan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi di luar rumah yang terdapat dalam kuesioner Susenas.

Dengan demikian, kondisi tersebut dapat menyebabkan penilaian kualitas konsumsi pangan menjadi kurang menggambarkan kondisi konsumsi pangan penduduk yang sesungguhnya. Indikator ini merupakan



Tanggung jawab OPD Dinas Ketahanan Pangan dan indikator capaian kinerja OPD pada Bidang Ketahanan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan kepada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun relatif dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan pencapaian skor PPH 100. Capaian keberhasilan Skor PPH Konsumsi tahun 2021 yaitu 92,53% dengan skor realisasi 86,9 dari target yang ditetapkan yaitu 94,1 atau terjadi penurunan sebesar 5,75% dari tahun 2020.



Berdasarkan Hasil Analisis Pola Pangan Harapan pada Tahun 2020, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Batam yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Batam mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2020, namun terjadi penurunan pada



tahun 2021 ini. Turunnya skor ini dikarenakan beberapa hal, antara lain:

1. Masih tingginya konsumsi beras di masyarakat, pola konsumsi pangan masyarakat masih ketergantungan pada komoditas tertentu yaitu beras.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
3. Knsumsi keragaman pangan yang masih kurang.
4. Kurangnya pengetahuan dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan.

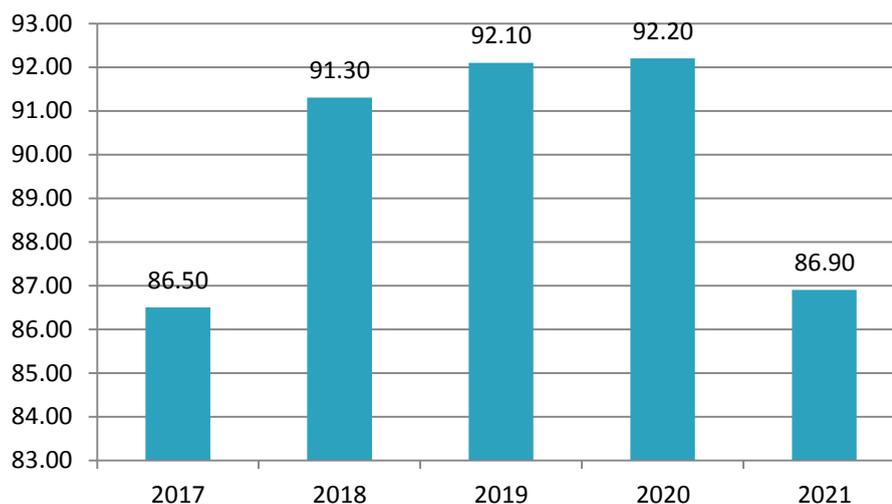
Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kembali skor ini adalah:

1. Sosialisasi ke masyarakat terkait diversifikasi pangan guna mendukung kebijakan Nasional tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2. Pemberian pelatihan pengolahan dan pendampingan cara mengolah pangan lokal kepada ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani (KWT) guna mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
3. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk mengembangkan pola pikir masyarakat secara khusus ibu rumah tangga dan keluarga.
4. Memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat.

Kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan nilai skor PPH pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik. 15
Nilai skor PPH Kota Batam tahun 2017 – 2021



Realisasi sasaran ini sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 74
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Realisasi			
	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	91,30	92,10	92,20	86,90

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Capaian sasaran ini melalui Program sebagai berikut:



Tabel. 75
Realisasi Program Sasaran 19 Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	992.518.000	707.941.900
2.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan	4.637.859.506	4.207.364.396
Total		5.630.377.506	4.915.306.296
Persentase			87,03

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan sebesar 87,03%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 12,70%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 92,35%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

20. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA PERAN INDUSTRI KECIL MENENGAH, KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PEREKONOMIANDAERAH”

Hasil pengukuran capaian kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 35,13% dan termasuk predikat “**Sangat Rendah**”. Data capaian kinerja sasaran 20 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 76
Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	%	15	5,27	35,13

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro diukur dengan $(\text{Jumlah industri kecil, menengah, koperasi, usaha mikro tahun } n - (n-1) / \text{industri kecil, menengah, koperasi, usaha mikro s/d tahun } n \times 100\%$.



Pada tahun 2021, Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Kota Batam sampai dengan Desember terus berkembang secara aktif dan berperan dalam pembangunan Kota Batam dengan sangat baik dan produktif. Adapun pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro selama tahun 2021 adalah sebanyak 232 usaha, sehingga total keseluruhan sampai dengan akhir

2021 adalah sebanyak 1.694 usaha mikro ditambah usaha mikro pada tahun 2020 sebanyak 1.462 usaha. Namun pada pertumbuhan koperasi terjadi penurunan sebesar 11,34%, dimana jumlah koperasi pada tahun 2020 mencapai 1.014 koperasi, sedangkan pada tahun 2021 jumlah koperasi menjadi 899 koperasi. Realisasi sasaran pada tahun 2018 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 77

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, Koperasi, Usaha Mikro	%	13	13	47	5,27

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Dalam mencapai sasaran ini, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Akibat pandemi covid-19 ini, penurunan dalam penjualan yang diakibatkan minimnya masyarakat untuk keluar sebagai konsumen.
2. Sulitnya permodalan yang disebabkan terjadi penurunan tingkat penjualan.
3. Distribusi produk dikarenakan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar.
4. Keterbatasan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan tersediaan bahan baku dari sektor industry lain.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi, adalah:

1. Memberikan kebijakan penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM.
2. Memberikan keringanan pajak UMKM.
3. Menjalinkan kerjasama dengan industri lokal yang menyediakan bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM.

4. Melalui UPTD Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, juga diberikan pinjaman permodalan kepada pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro dengan menerapkan pembinaan penguatan permodalan secara produktif dan layak dikembangkan.



Capaian sasaran ini melalui Program sebagai berikut:

Tabel. 78

Realisasi Program Sasaran 20 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat	1.118.728.000	1.012.879.640
Persentase		90,54

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Realisasi dana yang digunakan mencapai 90,54%. Besaran efisiensi anggarannya adalah 9,46%. Dengan realisasi keuangan ini dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 35,13%, maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



21. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 75,01% dan termasuk predikat “**Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 21 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 79
Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	%	100	84,57	84,57
Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland	%	100	79,21	79,21
Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	%	6,76	4,17	61,24
Rata – rata Capaian				75,01

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland.

Pemerintah Kota Batam mewujudkannya dengan kegiatan meningkatkan Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan panjang Jalan Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah

Hinterland. Tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 100% atau sepanjang 89.146 m dari keseluruhan jalan di hinterland, namun terealisasi sebesar 84,57% atau bertambah sepanjang 13.753 m menjadi 75.393 meter. Capaian ini dikarenakan beberapa kegiatan fisik penunjang penanganan kawasan hinterland tidak terlaksana secara optimal karena dipengaruhi kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya di Kota Batam ataupun Indonesia namun hampir seluruh dunia. Hal ini sangat berdampak pada proses pembangunan, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk lebih mengutamakan penanganan pandemi Covid-19.



Hal ini akibat adanya beberapa permasalahan antara lain:

- a. Kesulitan penataan lingkungan permukiman sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman serta jaringan jalan lingkungan hinterland yang kurang karena sulitnya penanganan dan aksesibilitas menuju lokasi.

- b. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan sehingga mengakibatkan terganggunya akselerasi untuk membenahi lingkungan khususnya kawasan Hinterland.
- c. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah.
- d. Lemahnya database yang berguna untuk perencanaan.
- e. Arus urbanisasi yang belum terkendali.
- f. Pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan ekonomi dan anggaran pada Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Persentase pemenuhan jembatan/pelantar di Wilayah Hinterland.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tahun 2021 telah melakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan/pelantar yang ada di daerah hinterland sebesar 79,21% dari target 100% dengan capaian 79,21%.



Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat untuk dilalui karena adanya Pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 masih dalam tahap pemulihan pembangunan yang tentu saja hal ini masih sangat berdampak pada proses pembangunan, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk lebih mengutamakan penanganan pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah Kota Batam tetap semaksimal mungkin melaksanakan pelayanan pada masyarakat khususnya di kawasan hinterland.



Indikator ini diukur dari panjang jembatan/pelantar yang di bangun di wilayah hinterland dengan capaian sebesar 79,21%. Pada angka ini menunjukkan bahwa panjang jembatan di hinterland bertambah sepanjang 45 m menjadi 780,98 km dibandingkan panjang jembatan di hinterland pada tahun 2020 yakni 780,94 km.

3. Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland

Pencapaian indikator ini, Pemerintah Kota Batam mewujudkan dengan menyerahkan wewenang kepada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan pembangunan Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland. Namun karena dipengaruhi kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda, beberapa kegiatan penanganan kawasan hinterland tidak terlaksana secara optimal, dalam hal ini pelaksanaan yang bisa diberikan kepada masyarakat juga menjadi terbatas.



Namun, menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Batam tetap berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat khususnya di kawasan hinterland. Dengan total keseluruhan panjang drainase hinterland 43.124 meter, dengan realisasi 4,17% maka angka ini menunjukkan bahwa panjang drainase lingkungan di hinterland yg berkondisi baik bertambah sepanjang 1.800 meter menjadi 9.080 meter dibandingkan panjang drainase yang berkondisi



baik dilingkungan hinterland pada tahun 2020 yakni 7.280 meter, kondisi ini meningkat sebesar 24,73%. Indikator ini diukur dari panjang drainase yang di bangun di wilayah hinterland dengan capaian sebesar 75,01%. Sampai akhir tahun 2021 jumlah drainase hinterland yang membutuhkan penanganan pada tahun berikutnya masih sepanjang 34.044 meter.

Realisasi sasaran ini sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 80
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Pemenuhan jalan di Wilayah Hinterland	%	56,04	56,04	56,04	84,57
Persentase pemenuhan jembatan/ pelantar di Wilayah Hinterland	%	52,50	65,46	65,64	79,21
Persentase peningkatan cakupan PSU di wilayah Hinterland	%	7,81	8,48	2,53	4,17

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam



Capaian sasaran ini dicapai melalui Program:

Tabel. 81
Realisasi Program Sasaran 21 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland	1.021.373.000	980.036.990
Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar	2.000.000.000	1.982.418.000
Total	3.021.373.000	2.962.454.990
Persentase		98,05

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Dengan program dan kegiatan yang dilakukan pada dua Perangkat Daerah untuk pencapaian satu sasaran ini, rata-rata realisasi dana yang digunakan sebesar 97,52%. Dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja indikator sebesar 75,01% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 1,95%.

22. Analisis Kinerja Sasaran “MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DI HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**”. Data capaian kinerja sasaran 22 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel. 82
Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2021

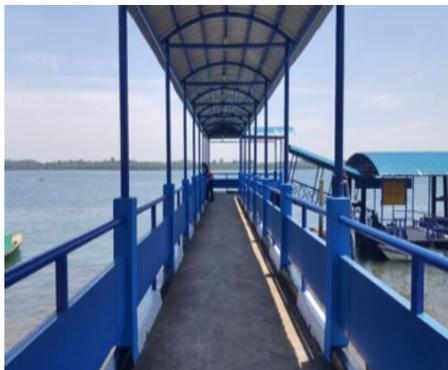
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	%	100	100	100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah Jumlah Kapal yang dibangun dibagi Target Kapal yang dibangun selama lima tahun dikali 100%. Jumlah Kapal yang ditargetkan di bangun selama 5 tahun adalah sebanyak 6 unit kapal.

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam tidak ada membangun kapal sehingga persentase jumlah pencapaian target terhadap pembangunan kapal ini mencapai 100% sesuai yang ditargetkan, hal ini mengingat jumlah kapal yang sudah dibangun oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 8 unit dari 6 unit yang ditargetkan dalam 5 tahun. Namun mengingat perlakuan atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan yang disusun oleh pemerintah pusat bahwa mulai tahun 2017 terhadap kapal yang dibangun Pemerintah Kota harus diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola dengan persyaratan pengelola adalah masyarakat yang berbadan hukum. Oleh karena itu untuk pembangunan kapal mulai tahun 2017 tidak bisa menambah asset Dinas Perhubungan. Sedangkan jumlah transportasi laut yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan untuk melayani masyarakat hinterland adalah sebanyak 1 unit kapal dan 3 unit speedboat

dengan kondisi yang sudah agak memprihatinkan. sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kegiatan untuk pengadaan kapal atau transportasi laut sudah tidak ada lagi. Sehingga untuk Renstra periode 2021 – 2026 Dinas Perhubungan sudah tidak menargetkan untuk pengadaan kapal.



Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak ada peningkatan ataupun penurunan, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan telah melayani masyarakat secara optimal dengan memanfaatkan 1 unit kapal yang ada dan 3 unit speedboat. Realisasi sasaran ini apabila dibandingkan terhadap target RPJMD telah mencapai 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 83

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 22 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Cakupan pelayanan Transportasi Laut di daerah hinterland	%	100	100	100	100

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian indikator ini melalui Program

Tabel. 84

Realisasi Program Sasaran 22 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	926.812.013	920.624.898
Total		99,33

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Dengan program tersebut yang dilakukan untuk pencapaian satu sasaran ini, realisasi dana yang digunakan sebesar 99,33%. Dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja indikator sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Besaran efisiensi anggarannya adalah 0,67%.



23. Analisis Kinerja Sasaran “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAN SANITASI DI HINTERLAND”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 101,36% dan termasuk predikat “**Sangat Tinggi**”. Data capaian kinerja sasaran 23 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 85
Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	%	39,55	43,85	110,87
Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	%	13,24	12,16	91,84
Rata - rata Capaian				101,36

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta.

Pengukuran dilaksanakan atas pemasangan Jaringan air bersih (SR/Sambungan Rumah) di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2021 berjumlah 6.485 SR atau melayani sekitar 25.940 jiwa. Dibandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 359 SR atau sebesar 5,86%. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan



jaringan SR serta penyambungan SR Mandiri di Kegiatan BLUD. Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan pelayanan air bersih diantaranya:

1. Pembangunan SPAM Pulau Petong Kel. Pulau Abang Kec. Galang (117 SR atau 468 jiwa)
2. Pembangunan SPAM Kampung Baru Kel. Subang Mas Kec. Galang (DAK Penugasan) - (86 SR atau 344 jiwa)
3. Peningkatan SPAM Pulau Ngenang Kel. Ngenang Kec. Nongsa (13 SR atau 52 jiwa)
4. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Ngenang Kel. Ngenang Kec. Nongsa (57 SR atau 228 jiwa)
5. Pemasangan Mandiri di UPT. PAB (86 SR atau 344 jiwa)

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 86

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam s.d akhir tahun 2021

No.	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Nama Waduk	Ket
1.	WTP Belakang Padang	1.238	4.952	Waduk Sekanak 1 dan Sekanak 2	Waduk dan Tadah Hujan
2.	WTP Mecan	264	1.056	Waduk Mecan	Waduk dan Tadah Hujan
3.	WTP Pemping	208	832	Waduk Pemping	Waduk dan Tadah Hujan
4.	WTP Kasu	211	844	Waduk Sungai Lumba	Waduk dan Tadah Hujan



5.	WTP Ngenang	173	692	Waduk Ngenang	Waduk dan Tadah Hujan
6.	WTP Pecung	239	956	Waduk Tanjung Kerang	Waduk dan Tadah Hujan
7.	WTP Bulang	231	924	Waduk Bulang Lintang	Waduk dan Tadah Hujan
8.	WTP Geranting	192	768	Waduk Pulau Riang	Waduk dan Tadah Hujan
9.	WTP Terong	273	1.092	Waduk Air Batang	Waduk dan Tadah Hujan
10.	WTP Setokok	111	444	Waduk Setokok	Waduk dan Tadah Hujan
11.	WTP Air Raja	150	600	Waduk Air Raja	Waduk dan Tadah Hujan
12.	WTP Subang Mas	68	272	Waduk Subang Mas	Waduk dan Tadah Hujan
13.	WTP Rempang Cate	137	548	Waduk Rempang Cate	Waduk dan Tadah Hujan
14.	WTP Pulau Abang	281	1.124	Waduk Pulau Abang	Waduk dan Tadah Hujan
15.	WTP Sembulang	80	320	Tangkapan Air Sembulang	Tangkapan Air
16.	IKK Tiangwangkang	37	1.748	-	PT. ATB/ SPAM BATAM
17.	IKK Pulau Buluh	556	2.224	-	PT. ATB/ SPAM BATAM
18.	SWRO Belakang Padang	774	3.096	-	Air laut
19.	WTP Jaloh	228	912	Waduk Pulau Jaloh	Waduk dan Tadah Hujan



20.	WTP Temoyong	159	636	Waduk Temoyong	Waduk dan Tadah Hujan
21.	WTP Air Gara Bertam	172	688	Waduk Bertam	Waduk dan Tadah Hujan
22.	WTP Tanjung Banun	98	392	Waduk Tanjung Banun	Waduk dan Tadah Hujan
23.	WTP Petong	19	476	Kel. Tanjung Sari	Waduk dan Tadah Hujan
24.	WTP Kp. Baru Galang	86	344	Kel. Tanjung Sari	Waduk dan Tadah Hujan
Jumlah		6.485	25.940		

Sumber data : Dinas CKTR Kota Batam

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari semua Stage Holder untuk percepatan penuntasan infrastruktur layanan air bersih untuk semua wilayah Hinterland dan kawasan yang menjadi tupoksi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Pada Tahun 2021 dirancang peningkatan penanganan sumber-sumber air di wilayah Hinterland yang memiliki sumber air baku dan atau yang memiliki konektivitas jaringan pipa ATB terdekat. Selain itu keterlibatan masyarakat berupa hibah lahan ikut punya andil yang besar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih secepatnya dapat tercapai.
2. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.



3. Pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih sampai pada meteran didepan rumah
4. Komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sarana air bersih.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.
2. Sulitnya dan terbatasnya sumber air baku yang tersedia kurang memadai untuk dilakukan pengolahan air bersih sampai mengalir ke rumah-rumah, bahkan ada sebagian lokasi WTP hanya mengandalkan sumber air hujan.
3. Lokasi yang akan dijadikan pengolahan air bersih merupakan pulau-pulau kecil hanya berpenduduk tidak kurang dari 100 jiwa, sehingga menimbulkan coast yang tidak sedikit.

2. Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland

Pada indikator ini, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam juga melaksanakan kegiatan infrastruktur untuk menunjang penyediaan sanitasi yang layak. Indikator Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland diukur dengan penyediaan system penanganan limbah secara komunal atas pemasangan jaringan sanitasi (SR/Sambungan Rumah) di wilayah Hinterland dan



kelurahan di mainland yang merupakan lokasi pesisir pantai. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah SR berjumlah 1.799 atau sekitar 8.995 jiwa. terjadi penambahan sebesar 13,86% dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah SR sebesar 1.580. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan baru Tangki Septitank Skala Komunal di beberapa lokasi. Daftar pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan sanitasi diantaranya:

1. Pemeliharaan sarana sanitasi air limbah komunal lingkungan Pulau Akar Kel.Setokok Kec. Bulang (1 lokasi)
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Temoyong Kecamatan Bulang (DAK Penugasan) - (10 unit = 90 SR atau 450 jiwa).
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Galang Baru Kecamatan Galang (DAK Penugasan) - (10 unit = 90 SR atau 450 jiwa).
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar (DAK Penugasan) - (5 unit = 39 SR atau 195 jiwa).

Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 87

Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d akhir tahun 2021

No.	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Ket
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/ Bulang	MCK+	25	125	KSM P.BULANG LINTANG	Pembangu nan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/ Bulang	MCK+	25	125	KSM P.JALOH	Pembangu nan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P. MECAN	Pembangun an di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/B elakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.GERANT ING	Pembangu nan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sek upang	IPAL Komunal	29	145	KSM KAMPUNG BUKIT	Pembangu nan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuan g/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM TANJUNG SENGKUA NG	Pembangu nan di Tahun 2012
7.	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM BULANG KEBAM	Pembangu nan di Tahun 2012
8.	TanjungRiau	Tanjung Riau/Sek upang	MCK+	25	125	KSM PULAU SERAYA	Pembangu nan di Tahun 2012



9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM AIR RAJA	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM PULAU ABANG	Pembangunan di Tahun 2015
11.	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM LANCANG KUNING	Pembangunan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM TIANGWA NGKANG SUKSES	Pembangunan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	CV. ADELIA PRATAMA	Pembangunan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM PECUNG MANDIRI	Pembangunan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Non gsa	IPAL Komunal	44	220	KSM PUNGGUR SEHAT SEJAHTERA	Pembangunan di Tahun 2017
16.	SubangMas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM SUBANG MAS CEMERLANG	Pembangunan di Tahun 2017



17.	Sekanak	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM MELAYU BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018
18.	Pulau Lengkang	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM LENGKANG BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018
19.	Pulau Mecan	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM MECAN JAYA	Pembangu nan di Tahun 2018
20.	Pulau Sarang	Sekanak/ Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM SARANG BERSATU	Pembangu nan di Tahun 2018
21.	Pulau Kasu	Kasu/Bela kang Padang	Komunal Kombinasi	225	1,125	KSM KASU JAYA	Pembangu nan di Tahun 2018
22.	Pulau Ngenang	Ngenang/ Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM NGENANG JAYA	Pembangu nan di Tahun 2018
23.	Pulau Geranting	Pulau Terong/B elakang Padang	IPAL Komunal	105	525	HINTERLA ND BERBAKTI	Pembangu nan di Tahun 2019
24.	Pulau Karas	Karas/Gal ang	IPAL Komunal	84	420	KSM GALANG GEMILANG	Pembangu nan di Tahun 2019
25.	Pulau Lance	Tembesi/ Sagulung	IPAL Komunal	35	175	LANCE GEMILANG PERMAI	Pembangu nan di Tahun 2019



26	Tanjung Riau Kecamatan	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM TANJUNG RIAU ELOK	Pembangunan di Tahun 2020
27	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM CATE BERSIH	Pembangunan di Tahun 2020
28	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM SEMBULANG JAYA	Pembangunan di Tahun 2020
29	Bulang Lintang Kecamatan	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM BULANG LESTARI	Pembangunan di Tahun 2020
30	Pantai Gelam Kecamatan	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM MAJU BERSAMA	Pembangunan di Tahun 2020
31	Temoyong	Temoyong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	90	450	KSM Batu Merah Bersatu	Pembangunan di Tahun 2021
32	Galang Baru	Galang Baru/Galang	Komunal	90	450	KSM Kelurahan Galang Baru	Pembangunan di Tahun 2021
33	Batu Merah	Batu Merah/Batu Ampar	Tangki Septik Skala Komunal	39	195	KSM Tuah Anak Negeri	Pembangunan di Tahun 2021
Total				1.799	8.995		

Sumber data : Dinas CKTR Kota Batam



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pemerataan dan peningkatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana sanitasi lingkungan permukiman di wilayah Hinterland juga mendapat dukungan ketersediaan lahan oleh warga masyarakat setempat.
2. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari Pemerintah Pusat melalui penyediaan dana DAK untuk penyediaan sanitasi komunal.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor-faktor yang menjadi kendala pencapaian sasaran, antara lain:

1. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana sanitasi yang mengalami kerusakan kurang optimal, sehingga pemeliharaan menunggu dana dari Pemerintah.
2. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam sangat tinggi, sehingga berakibat sulitnya membuat target penuntasan penanganan secara keseluruhan.

Realisasi sasaran ini sampai dengan akhir RPJMD di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 88

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 23 Tahun 2018 – 2021

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
Cakupan pelayanan air minum dikawasan non ATB/swasta	%	33,18	35,16	37,29	43,85
Cakupan pelayanan sanitasi dikawasan hinterland	%	4,74	9,18	10,92	12,16

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Pencapaian indikator ini melalui Program

Tabel. 89

Realisasi Program Sasaran 23 Tahun 2021

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi di Hinterland	62.428.305.430	58.766.828.553
Persentase		94,13

Sumber data : Bapelitbangda Kota Batam

Dengan realisasi dana yang digunakan sebesar 94,13% dalam capaian sasaran ini, besaran efisiensi anggarannya adalah 5,87%. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata kinerja indikator sebesar 101,36% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



C. ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN KINERJA

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

- b. Tidak Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Kota Batam telah menetapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel. 90
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Pencapaian
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas	100	77,08	Efisien
2	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	75,43	94,95	Tidak Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	51,30	Efisien



4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	33,80	81,83	Tidak Efisien
5	Meningkatnya Kelengkapan Administrasi Kependudukan	96,86	63,48	Efisien
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	95,24	71,31	Efisien
7	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	100,63	50,46	Efisien
8	Meningkatkan kualitas peran gender	97,99	94,56	Efisien
9	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	89,11	-	-



10	Mengurangi angka pengangguran	51,55	97,64	Tidak Efisien
11	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	82,36	94,82	Tidak Efisien
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat	108,21	96,78	Efisien
13	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	100	78,97	Efisien
14	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang terpadu dan nyaman	168,52	94,84	Efisien
15	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak	102,72	100	Efisien



16	Meningkatkan kinerja sektor Perindustrian dan perdagangan	138,82	82,74	Efisien
17	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata	-	93,32	-
18	Peningkatan Investasi Kota Batam	169,94	82,98	Efisien
19	Meningkatkan sektor pertanian/perikanan	92,35	87,30	Efisien
20	Meningkatnya peran industri kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	35,13	90,54	Tidak Efisien
21	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur hinterland	75,01	98,05	Tidak Efisien



22	Meningkatnya konektivitas Transportasi di hinterland	100	99,33	Efisien
23	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland	101,36	94,13	Efisien



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.
2. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Batam atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 yang terdiri dari 23 sasaran, adalah sebagai berikut:
 - a) Capaian kinerja $91 \leq 100$ kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 14 sasaran atau 60,87%;
 - b) Capaian kinerja $76 \leq 90$ kategori “Tinggi” sebanyak 3 sasaran atau 13,04%;
 - c) Capaian kinerja $66 \leq 75$ kategori “Sedang” sebanyak 1 sasaran, atau 4,35%; dan
 - d) Capaian kinerja $51 \leq 65$ kategori “Rendah” sebanyak 2 sasaran, atau 8,70%.
 - e) Capaian kinerja ≤ 50 kategori “Rendah” sebanyak 2 sasaran, atau 8,70%.
 - f) Data tidak tersedia terdapat pada 1 sasaran yakni sasaran “MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA.” Dengan persentase 4,35%.



Rata-rata capaian 23 sasaran mencapai 91,96%, rata-rata realisasi anggaran dalam mencapai target sasaran sebesar 81,53%. Penghargaan Pemerintah Kota Batam selama tahun 2021 sebanyak 19 prestasi.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan kedepan dalam menjawab tantangan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperbaiki kualitas Perencanaan Kinerja serta menjadikan target kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
2. Memperbaiki kualitas Pengukuran Kinerja terkait IKU organisasi serta penggunaan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja dari tingkat Eselon II sampai Eselon IV.
3. Menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan antar semua pejabat di unit kerja masing - masing tentang identifikasi IKU dan dokumen apa serta kegiatan apa yang dijadikan bukti dukung capaian IKU tersebut.
4. Informasi capaian kinerja harus secara jelas dijabarkan dalam dokumen Laporan Kinerja sehingga dapat memberikan keyakinan bagi pembaca bahwa capaian kinerja yang disampaikan dapat diandalkan.



5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Perangkat Daerah dengan berbagai unsur dalam pembangunan untuk mewujudkan kinerja yang semakin berkualitas.
6. Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.

LAMPIRAN

Perjanjian Kota Batam Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KOTA BATAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUDI

Jabatan : WALI KOTA BATAM

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batam, 9 Februari 2022

WALI KOTA BATAM,



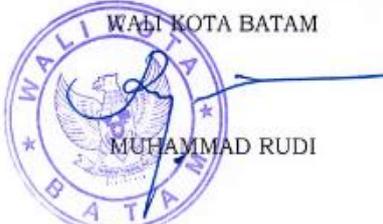
MUHAMMAD RUDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOTA BATAM**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berdaya saing	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	5,05%
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	2. Indeks Gini	Indeks	0,330
3	Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	3. Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	65,11
4	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	4. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,46
		5. Persentase penduduk miskin	Persen	4,74%
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	6. Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	53,07
6	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64 (B)
7	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	8. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	9,56%
8	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	9. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,44
9	Menurunnya angka pengangguran	10. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,00%
10	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	11. Opini BPK	Opini	WTP
		12. Nilai LPPD	Kategori	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	13. Indeks SPBE	Indeks	3,09

Batam, 9 Februari 2022

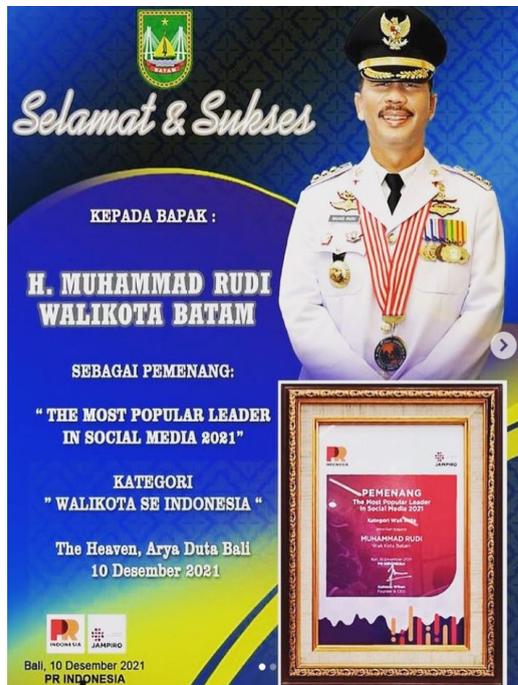
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

**DAFTAR PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2021**

No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
1	2021	Majalah PR INDONESIA	<p style="text-align: center;">"The Most Popular Leader in Social Media 2021"</p> <p style="text-align: center;">Penghargaan Kategori Wali Kota se-Indonesia</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
2	2021	Seven Media Asia Award 2021	<p>"Excellence Figur During the Pandemic"</p> <p>Penghargaan Best Figure Excellence 2021 kepada Walikota Batam, H. Muhammad Rudi;</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
3	2021	Menteri Hukum dan HAM RI	<p>“Terbaik I Se- Indonesia” Kategori Sekretariat DPRD Kota</p> <p>Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
4	2021	Baznas Kota Batam	Piagam Penghargaan Insan Peduli Zakat kepada Bapak H. Muhammad Rudi



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
5	2021	Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI	<p>“Peringkat I untuk kategori Implementasi Penilaian Kinerja”</p> <p>Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Pemerintah Kota Tipe A kepada Pemko Batam</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
6	2021	Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI	<p>“Peringkat II untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, kepangkatan dan Pensiun”</p> <p>Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Pemerintah Kota Tipe A kepada Pemko Batam</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
7	2021	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Batam	“Terbaik I Pengelolaan BMD Tingkat Kepri” Piagam Penghargaan Valuation Award



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
8	2021	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik	<p>“Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021”</p> <p>Penghargaan Inovasi Tapping Box Optimalisasi Pajak Daerah kepada Kota Batam</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
9	2021	Institut Teknologi Bandung (ITB)	<p>“Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2021”</p> <p>Piagam penghargaan sebagai implementasi program smartcity dan tranformasi digital.</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
10	2021	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Prov. Kepri	Penghargaan atas Komitmen Mendukung Pelaksanaan Program Sekolah penggerak Angkatan I dalam rangka Percepatan Transformasi dan Reformasi Pendidikan di Kota Batam



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
11	2021	Dewan Pendidikan Kota Batam	Award 2021 sebagai Pemimpin Peduli Pendidikan Kota Batam



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
12	2021	Komisi Informasi Prov. Kepri	<p>“Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021”</p> <p>Piagam Penghargaan kepada Muhammad Rudi sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
13	2021	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Piagam Penghargaan atas raihan Opini BPK dengan Predikat “WTP” Wajar Tanpa Pengecualian



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
14	2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	<p>“PERINGKAT III, Kategori Berita”</p> <p>Piagam Penghargaan sebagai Media Centre Kab/Kota Teraktif Berkontribusi</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
15	2021	Bike to Work (B2W) Indonesia	<p>“Kota Ramah Sepeda Terbaik III”</p> <p>Piagam Penghargaan Kategori Kota Besar/Ibu Kota Provinsi Ramah Sepeda</p>



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
16	2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia	“Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020” Piagam Penghargaan Kategori Madya



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
17	2021	Gubernur Provinsi Kepulauan Riau	Juara Umum STQ Ke-9 Provinsi Kepri



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
18	2021	PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Prov. Kepri	Piagam Penghargaan kepada Walikota Batam atas Jasa-Jasa & Pengabdian dalam Membina & Memajukan Masjid/Musholla di Kota Batam Sehingga Mengalami Peningkatan Baik Secara Kuantitas Maupun Kualitas dan Layak Menjadi Daerah Percontohan Pembinaan Masjid/Musholla di Prov. Kepri.



No.	TAHUN PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI	NAMA PENGHARGAAN
19	2021	Perkumpulan Anak Tempatan (PERPAT) Kepulauan Riau	Piagam Penghargaan kepada Walikota Batam sebagai Bapak Pembangunan

